

SENSUS EKONOMI 2016
ANALISIS HASIL *LISTING*

POTENSI EKONOMI KABUPATEN TASIKMALAYA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TASIKMALAYA**

SENSUS EKONOMI 2016
ANALISIS HASIL LISTING

POTENSI EKONOMI KABUPATEN TASIKMALAYA



Sensus Ekonomi 2016 Hasil *Listing* Potensi Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya

ISBN : 978-602-51377-1-6
No. Publikasi : 3206.17.47
Katalog : 9102059.3206
Ukuran Buku : 17,6 x 25cm
Jumlah Halaman: xiii + 111 Halaman

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kabupaten Tasikmalaya

Gambar Kulit :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kabupaten Tasikmalaya

Diterbitkan oleh:
BPS Kabupaten Tasikmalaya

Dicetak oleh :
Percetakan Dunia Printing

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik*

TIM PENYUSUN

Pengarah

Gandjar Rachman

Penanggungjawab

Iis Rina Mulyawati

Editor

Ganjar

Asep Sarifudin

Deni Iskandar

Dani Hapidin

Penulis

Iis Rina Mulyawati

Pengolahan Data

Iis Rina Mulyawati

Dindin Muldiana

Desain dan Tata Letak Layout

Iis Rina Mulyawati

Dindin Muldiana

Kontributor Data

Sekretariat SE2016



Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016). Pelaksanaan SE2016 dilakukan dalam beberapa tahapan, salah satunya adalah listing atau pendaftaran usaha/perusahaan (SE2016-L). Listing merupakan kegiatan pendataan secara lengkap seluruh kegiatan unit usaha/perusahaan di wilayah Indonesia kecuali kegiatan Pertanian, Kehutanan, & Perikanan dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib. Tujuannya adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai unit usaha/perusahaan beserta karakteristik usahanya. Dengan ketersediaan data yang lengkap mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya maka hasil SE2016-L dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas usaha yang potensial baik dalam hal penyerapan tenaga kerja maupun penyediaan lapangan usaha.

Publikasi Potensi Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya 2016 ditujukan untuk memperoleh gambaran dan informasi potensi ekonomi kewilayahan. Informasi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah dalam mengevaluasi program-program terkait pengembangan potensi wilayah yang sudah dilakukan selama ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan SE2016-L hingga penyusunan publikasi ini dapat terlaksana. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat kepada segenap penggunanya.

Tasikmalaya, Desember 2017
Kepala Badan Pusat statistik
Kabupaten Tasikmalaya

Ir. Gandjar Rachman

Kategori Cakupan Sensus Ekonomi 2016

- Kategori B : Pertambangan dan Penggalian
- Kategori C : Industri penggalian
- Kategori D : Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
- Kategori E : Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi
- Kategori F : Konstruksi
- Kategori G : Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor
- Kategori H : Pengangkutan dan pergudangan
- Kategori I : Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
- Kategori J : Informasi Dan Komunikasi
- Kategori K : Aktivitas Keuangan Dan Asuransi
- Kategori L : Real Estat
- Kategori M : Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
- Kategori N : Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
- Kategori P : Pendidikan
- Kategori Q : Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial
- Kategori R : Kesenian, Hiburan dan Rekreasi
- Kategori S : Aktivitas Jasa Lainnya
- Kategori U : Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

<https://tasikmalayakab.bps.go.id>

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Kategori Cakupan Sensus Ekonomi 2016	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Grafik	xii
Bab 1	1
Potensi Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya	
• Sumber Daya Manusia yang Melimpah Penggerak Ekonomi	3
• Perekonomian Kabupaten Tasikmalaya Cukup Stabil dalam 5 Tahun Terakhir	10
• Penggerak Utama Perekonomian Kabupaten Tasikmalaya	12
Bab 2	17
Tantangan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya	
• Kualitas SDM Menjadi Tantangan Pembangunan Ekonomi	23
• Ketidakmerataan Infrastruktur	26
Bab 3	32
Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Pemerataan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya	
• Potensi Ekonomi Regional	38
• Pemetaan Hasil Pengukuran Potensi Ekonomi Regional	40
Bab 4	52
Industri Pengolahan : Penopang Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya	
Bab 5	57
Perdagangan Sebagai Kategori Unggulan Kabupaten Tasikmalaya	
Bab 6	65
Jasa Pendidikan Sebagai Kategori Unggulan Kabupaten Tasikmalaya	
Bab 7	75
Intisari	
Daftar Pustaka	79
Catatan Teknis	85
Lampiran	94

Daftar Tabel

Jumlah Tenaga Kerja Usaha/Perusahaan Menurut Skala Usaha dan Kabupaten/Kota di Priangan Timur dan Jawa Barat 2016	Tabel 1.1.	9
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Timur dan Jawa Barat 2011-2016 (%)	Tabel 1.2.	12
Rasio Panjang Jalan (Km) Terhadap Luas Wilayah (Km ²) Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2016	Tabel 2.1.	29
Kontribusi PDRB dan laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya, 2011-2016	Tabel 3.1	37
Hasil LQ Jumlah Usaha UMB dan UMK Kabupaten/Kota di Priangan Timur, 2016	Tabel 3.2.	41
Hasil LQ Jumlah Tenaga Kerja UMB dan UMK Kabupaten/ Kota di Priangan Timur, 2016	Tabel 3.3.	42
LQ Tenaga Kerja Menurut Kategori Di Kabupaten Tasikmalaya	Tabel 3.4.	45
Topologi Klasen Kategori di Kabupaten Tasikmalaya	Tabel 3.5.	48
Sektor Unggulan Berdasarkan Analisis <i>Overlay Base Economic Approach</i>	Tabel 3.6.	50
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan 2011-2016	Tabel 4.1.	55
Jumlah Usaha Berdasarkan Kategori dan Skala Usaha di Kabupaten Tasikmalaya, 2016	Tabel 5.1.	62
Kotribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan 2011-2016	Tabel 5.2.	63

Daftar Tabel

Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016	Tabel 6.1.	67
Persentase Penduduk Kelompok Umur menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016	Tabel 6.2.	69
Persentase Penduduk Kelompok Umur menurut Partisipasi Sekolah Murni dan Jenis Kelamin, Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016	Tabel 6.3.	70
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya 2011-2016	Tabel 6.4.	72
Proporsi Usaha dan Tenaga Kerja Kategori Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya dan Propinsi Jawa Barat	Tabel 6.5.	73

Daftar Grafik

Jumlah Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja di Kabupaten Tasikmalaya 2011-2015 (Juta Orang)	Grafik 1.1.	4
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Tasikmalaya), 2011-2015 (%)	Grafik 1.2.	5
Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tasikmalaya, 2011-2015 (%)	Grafik 1.3.	6
Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Informal di Kabupaten Tasikmalaya 2011-2015 (juta orang)	Grafik 1.4.	7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya 2011-2016(%)	Grafik 1.5.	11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Beberapa kategori di Kabupaten Tasikmalaya, 2011-2016 (%)	Grafik 1.6.	13
Distribusi Usaha/Perusahaan Kabupaten Tasikmalaya Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen), 2016	Grafik 1.7.	14
Distribusi Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Usaha Menengah Besar (UMB) Menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur Tahun 2016 (%)	Grafik 1.8..	16
Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2015	Grafik 2.1.	24
Persentase Tenaga Kerja dengan Pendidikan SMA Keatas, di Kabupaten Tasikmalaya 2011-2015	Grafik 2.2.	25

Daftar Grafik

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2017	Grafik 2.3.	30
Kotribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan 2011-2016	Grafik 3.1.	46
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya 2011-2016	Grafik 4.1.	55
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan Besar Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya 2011-2016	Grafik 5.1.	64
PDRB Kategori P Nilai dan Perannya Terhadap PDRB Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 – 2016	Grafik 6.1.	72



Bab 1

**POTENSI EKONOMI
KABUPATEN TASIKMALAYA**

BAB I

POTENSI EKONOMI KABUPATEN TASIKMALAYA

Sumber Daya Manusia yang Melimpah Penggerak Ekonomi

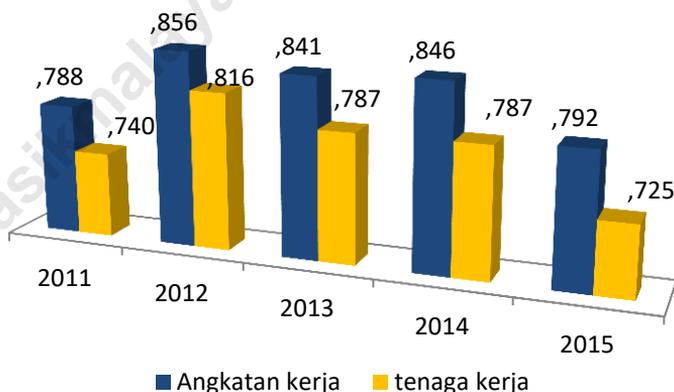
Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bagian dari faktor produksi merupakan potensi kekuatan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya yang cukup penting selain Sumber Daya Alam. SDM ini dapat berperan sebagai faktor produksi tenaga kerja yang dapat menguasai teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian.

Faktor sumber daya manusia ini telah menghadirkan suatu proses pemikiran baru dalam telaah teori-teori pembangunan ekonomi, yang menempatkan sumber daya manusia sebagai poros utama pembangunan ekonomi baik dalam skala global, nasional maupun daerah. Strategi pembangunan ekonomi yang berbasis pada pengembangan sumber daya manusia (*human resources development*) dianggap sangat relevan dan cocok dengan kondisi dan karakter pembangunan ekonomi terutama di negara-negara berkembang sejak era 80-an. Strategi pembangunan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang pakar perencanaan pembangunan ekonomi berkebangsaan Pakistan yang bernama Mahbub UI Haq yang pada saat itu menjadi konsultan utama *United Nation Development Programme* (UNDP). Mahbub UI Haq berpendapat bahwa pengembangan sumber daya manusia harus dijadikan landasan utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Hal ini dianggap penting mengingat ketertinggalan negara-negara berkembang terhadap negara-negara industri maju dalam tingkat kesejahteraan ekonomi seperti kualitas dan standar hidup hanya akan dapat diperkecil

manakala terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan pola pemikiran tersebut maka takaran peranan sumber daya manusia dalam proses pembangunan ekonomi daerah dalam konteks untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah pada dasarnya harus dilihat dari aspek peningkatan kualitasnya. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin meningkat, akan dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi sekaligus sebagai modal dasar untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, SDM yang banyak dan berkualitas merupakan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Grafik 1.1. Jumlah Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja di Kabupaten Tasikmalaya 2011-2015 (Juta Orang)



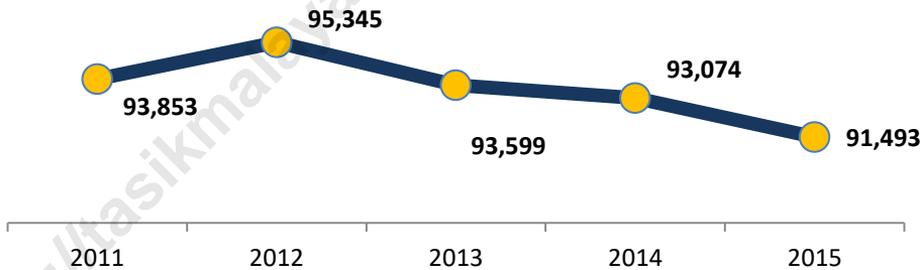
Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2011-2015, BPS Provinsi Jawa Barat

Dengan jumlah penduduk sebesar 1.742.276 maka Kabupaten Tasikmalaya tidak kesulitan dalam penyediaan tenaga kerja. Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya yang besar juga menjadi kunci sukses bagi peningkatan daya saing Kabupaten Tasikmalaya. Dengan dukungan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, akan

berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan daya saing nasional.

Jumlah angkatan kerja yang menggambarkan penawaran tenaga kerja selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Data tahun 2015 keadaan bulan Agustus menunjukkan bahwa ada sekitar 0,79 juta orang angkatan kerja di Kabupaten Tasikmalaya, sebanyak 0,72 juta orang diantaranya tercatat sebagai penduduk yang bekerja. Dengan kata lain, tingkat kesempatan kerja pada tahun 2015 adalah sebesar 91,49 persen. Angka tersebut menuurun dari kondisi tahun sebelumnya seperti terlihat dalam Grafik 1.2.

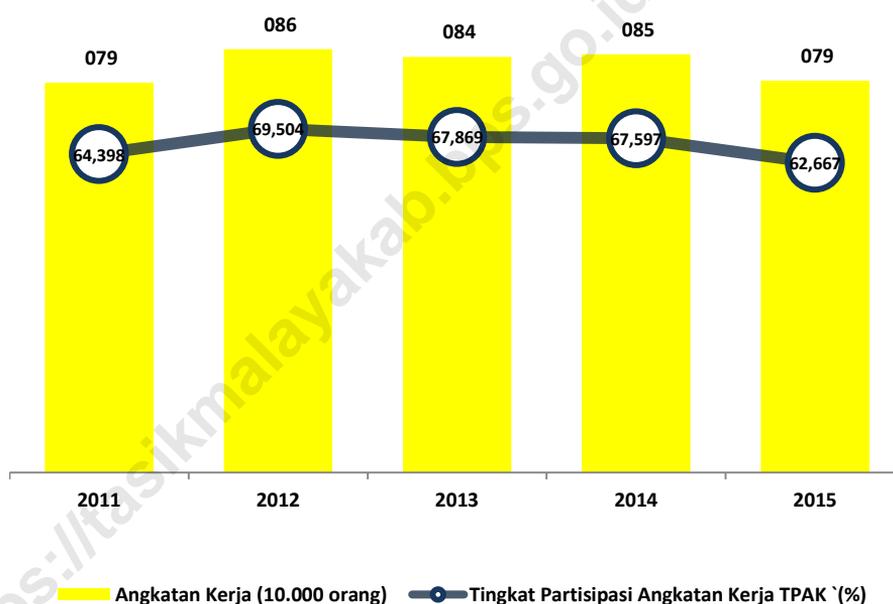
Grafik 1.2. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Tasikmalaya), 2011-2015 (%)



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2011-2015, BPS Provinsi Jawa Barat

Indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di atas mampu mengindikasikan besaran relatif dari *labour supply* yang tersedia untuk memproduksi output dalam suatu perekonomian. Keadaan Agustus 2015 menunjukkan bahwa penyediaan tenaga kerja untuk memproduksi output perekonomian menurun.

Grafik 1.3. Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tasikmalaya, 2011-2015 (%)



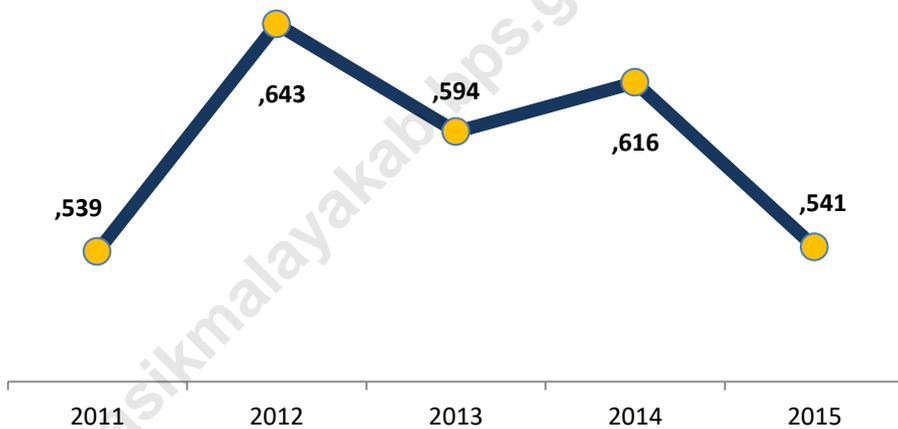
Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2011-2015, BPS Provinsi Jawa Barat

Penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam lima tahun terakhir juga menunjukkan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Tasikmalaya yang relatif melambat, sehingga memberikan pengaruh terhadap faktor faktor produksi khususnya tenaga kerja di

Kabupaten Tasikmalaya. Pada keadaan Agustus 2015, TPAK Kabupaten Tasikmalaya mencapai 62,67 persen.

Tenaga kerja Kabupaten Tasikmalaya mayoritas berpendidikan SD ke bawah. Hal ini akan menimbulkan tingginya pengangguran sebagai akibat dari tidak tertampungnya tenaga profesional dengan keahlian khusus. Namun, di sisi lain tidak tertampungnya pekerja profesional akan menciptakan lapangan pekerjaan di sektor informal.

Grafik 1.4. Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Informal di Kabupaten Tasikmalaya 2011-2015 (juta orang)



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2011-2015, BPS Provinsi Jawa Barat

Kegiatan informal mempunyai karakteristik antara lain: berskala kecil, dimiliki oleh individu atau keluarga, menggunakan teknologi yang sederhana, bersifat padat tenaga kerja, pendidikan dan keahlian tenaga kerja rendah, dan tingkat upah yang relatif rendah pula (Bappenas, 2009). Keberadaan dan kelangsungan kegiatan informal di dalam perekonomian Kabupaten Tasikmalaya merupakan realitas yang juga

berperan dalam menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja. Kegiatan informal mampu menampung tenaga kerja dengan keahlian yang kurang. Sebagai dampak positif kegiatan informal adalah berkurangnya pengangguran. Pada Agustus 2015, jumlah tenaga kerja di Kabupaten Tasikmalaya yang bekerja pada sektor informal mencapai 0,54 juta orang, menurun jika dibandingkan periode sebelumnya.

Kegiatan informal biasanya merupakan Usaha Mikro Kecil (UMK) yang memang menjadi andalan penduduk Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan hasil SE2016, jumlah tenaga kerja UMK nonpertanian tercatat sebanyak 0,34 juta orang (97,52 persen). Komposisi ini hampir seragam di setiap wilayah. Jika dilihat berdasarkan hasil SE 2016 sebaran tenaga kerja menurut kabupaten/kota menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja UMK mendominasi keseluruhan tenaga kerja di luar sektor pertanian di Priangan Timur Jawa Barat.

Usaha Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor menyerap tenaga kerja paling banyak dengan penggunaan tenaga kerja lebih dari 127 ribu orang. Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, dan Pendidikan merupakan usaha yang menyerap tenaga kerja tertinggi lainnya. Khusus aktivitas pendidikan, mayoritas usaha diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat nonprofit, yang secara konsep dikategorikan sebagai UMK, sehingga tenaga kerja yang digunakan menambah jumlah tenaga kerja UMK.

Tabel 1.1. Jumlah Tenaga Kerja Usaha/Perusahaan Menurut Skala Usaha dan Kabupaten/Kota, di Priangan Timur dan Jawa Barat 2016

Kabupaten/Kota	Skala Usaha		Jumlah
	UMK	UMB	
[1]	[2]	[3]	[4]
3205 Garut	469.035	42.638	511.673
3206 Tasikmalaya	340.461	8.642	349.103
3207 Ciamis	249.642	16.671	266.313
3218 Pangandaran	114.968	5.278	120.246
3278 Kota Tasikmalaya	181.259	38.876	220.135
3279 Kota Banjar	48.420	12.578	60.998
Priangan Timur	1.403.785	124.683	1.528.468
3200 Jawa Barat	8.486.372	2.884.361	11.370.733

Sumber: Hasil SE2016 Listing, BPS Provinsi Jawa Barat

UMK tidak hanya merupakan tumpuan mata pencaharian penduduk Kabupaten Tasikmalaya tetapi juga sumber aktivitas yang memperkuat sendi perekonomian baik pada tingkat nasional maupun regional. Beberapa penelitian membuktikan bahwa UMK merupakan usaha yang memiliki fleksibilitas dan ketahanan yang tinggi terhadap guncangan ekonomi global. Proteksi ekonomi dan penguatan investasi pada skala usaha mikro kecil harus tetap diperkuat untuk mendukung keberlanjutan perekonomian bangsa.

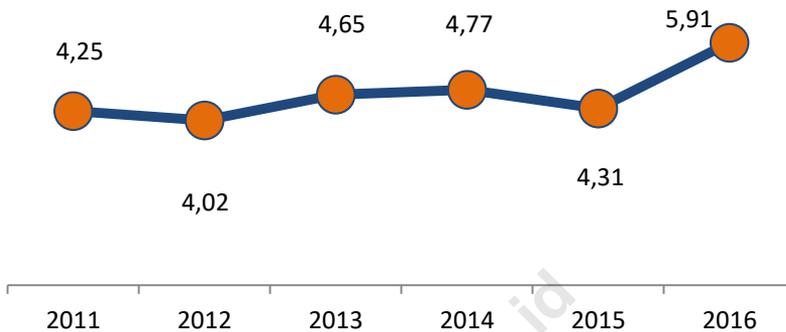
Sementara itu, bagi UMB stimulasi investasi di berbagai wilayah, terutama Jawa Barat bagian selatan sudah selayaknya diperkuat dengan mengidentifikasi keunggulan komparatif masing-masing wilayah agar kualitas daya saing Kabupaten Tasikmalaya tetap terjaga. Disparitas wilayah merupakan hal yang masih menjadi permasalahan pembangunan di Indonesia termasuk Kabupaten Tasikmalaya oleh sebab itu pembangunan berbasis

sumber daya ekonomi lokal menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Tidak hanya untuk pemerataan ekonomi, tetapi juga ditujukan untuk pemerataan kualitas sumber daya manusia.

Perekonomian Kabupaten Tasikmalaya Cukup Stabil dalam 5 Tahun Terakhir

Krisis ekonomi yang terjadi tahun 2008 berawal dari krisis keuangan Amerika Serikat yang umum disebut istilah *subprime mortgage*. Kemudian dilanjutkan dengan krisis global yang terjadi pada tahun 2011 di kawasan Eropa (*Eurozone Sovereign debt crisis*). Hampir semua negara mengalami dampak dari krisis tersebut tak terkecuali Indonesia. Namun karena faktor fundamental ekonomi Kabupaten Tasikmalaya cukup kuat setelah menghadapi krisis pada tahun 1997-1998, imbas krisis tersebut tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya. Disamping itu, keberadaan UMK yang mendominasi perekonomian Kabupaten Tasikmalaya turut andil menjaga stabilitas ekonomi Kabupaten Tasikmalaya.

Grafik 1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya 2011-2016(%)



Sumber : *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2012-2017, Badan Pusat Statistik*

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya sepanjang 2011-2016 menunjukkan kondisi yang cukup stabil. Walaupun mengalami perlambatan pertumbuhan pada periode 2012 dan 2015. Perbaikan kinerja Kabupaten Tasikmalaya kembali ditunjukkan pada tahun 2016. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016 melonjak cukup tinggi, yaitu mencapai 5,91 persen. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kinerja ekonomi pada berbagai lapangan usaha di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Timur dan Jawa Barat 2011-2016 (%)

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
3205 Garut	4,95	4,07	4,76	4,82	4,51	5,85
3206 Tasikmalaya	4,25	4,02	4,65	4,77	4,31	5,91
3207 Ciamis	5,23	5,41	5,34	5,07	5,59	6,59
3218 Pangandaran	4,34	5,18	4,95	4,19	4,98	5,16
3278 Kota Tasikmalaya	5,02	5,80	6,17	6,16	6,30	6,91
3279 Kota Banjar	5,47	5,32	5,45	4,98	5,32	5,86
3200 Jawa Barat	6,50	6,50	6,33	5,09	5,04	5,67

Sumber : *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2012-2017, Badan Pusat Statistik*

Penggerak Utama Perekonomian Kabupaten Tasikmalaya

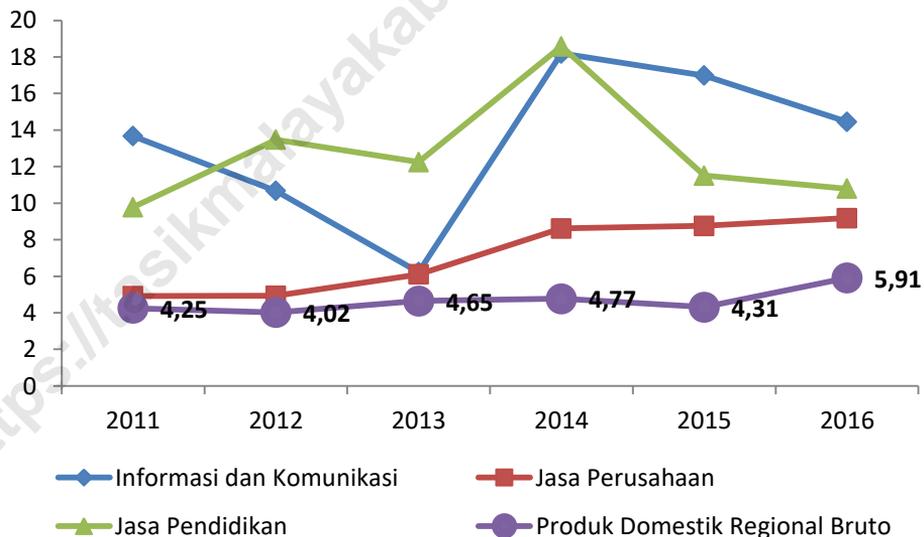
Dari hasil SE2016, jumlah usaha/perusahaan di Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebanyak 188 ribu usaha/perusahaan. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis *online* turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya beberapa tahun belakangan.

Di sisi lain, penguatan sendi perekonomian bangsa juga tidak terlepas dari menguatnya perekonomian pada berbagai aktivitas yang mulai menunjukkan perkembangan cukup pesat. Informasi dan Komunikasi, Jasa Perusahaan, dan Jasa Pendidikan adalah kategori usaha yang belakangan ini menjadi penguat keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya. Capaian pertumbuhan ekonomi kategori tersebut cukup tinggi dan selalu di atas pertumbuhan ekonomi total yang rata-rata tumbuh mencapai 4,65 persen pada periode 2011-2016. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang cukup

menggembirakan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Lapangan usaha informasi dan komunikasi mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya. Digitalisasi pada berbagai aspek kehidupan merupakan pendorong utama berkembang pesatnya kegiatan ekonomi informasi dan komunikasi. Pada tahun 2016 lapangan usaha ini tumbuh sebesar 14,45 persen, dengan rata-rata pertumbuhan 13,37 persen pada periode 2011 hingga 2016.

Grafik 1.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Beberapa kategori di Kabupaten Tasikmalaya, 2011-2016 (%)

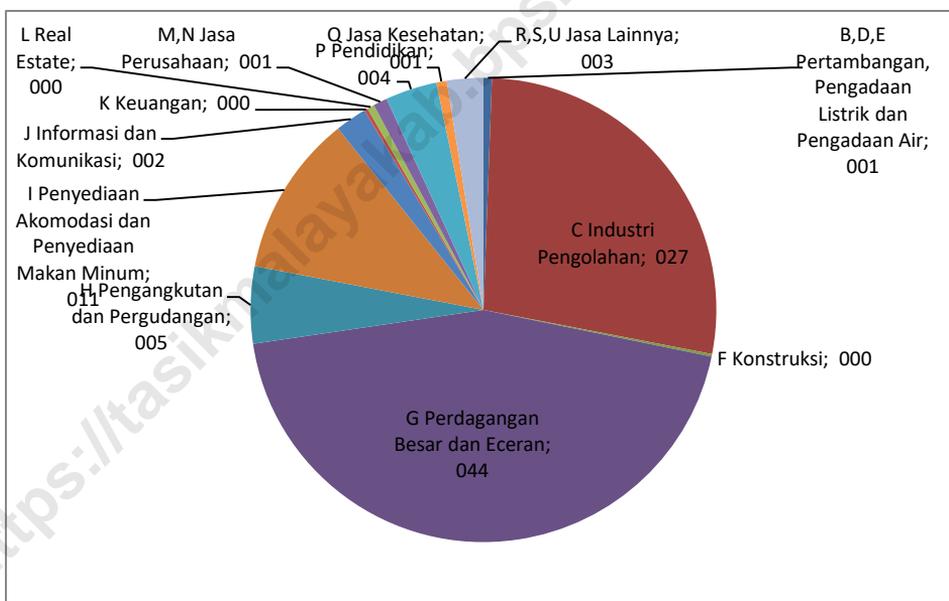


Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tasikmalaya Menurut Lapangan Usaha 2011-2016, BPS Kabupaten Tasikmalaya

Namun demikian, secara kuantitas, aktivitas ekonomi yang paling banyak dijalankan adalah usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor (Kategori G), berjumlah

44,44 persen. Kemudian, Industri Pengolahan (Kategori C) merupakan aktivitas ekonomi terbesar kedua yang dijalankan oleh sekitar 27,46 persen usaha/perusahaan dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) merupakan aktivitas ekonomi terbesar ketiga yang dijalankan oleh sekitar 11,25 persen usaha/perusahaan. Hal ini menunjukkan secara kuantitas sebanyak 83,15 persen usaha/perusahaan bergerak dalam tiga kategori tersebut.

Grafik 1.7. Distribusi Usaha/Perusahaan Kabupaten Tasikmalaya Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen), 2016



Sumber: Hasil SE2016 Listing, BPS Provinsi Jawa Barat

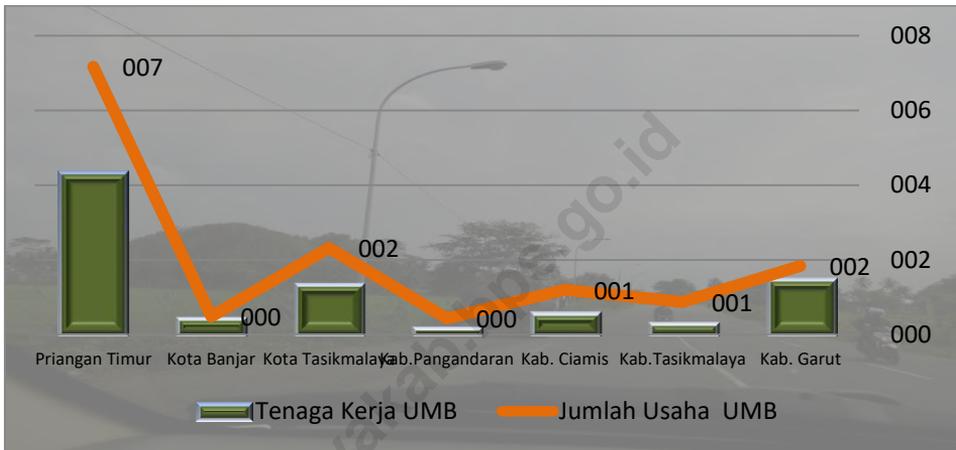
Secara kuantitas aktivitas ekonomi Kabupaten Tasikmalaya di luar Pertanian banyak digerakkan oleh kategori lapangan usaha penghasil *output* barang seperti Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor; dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum. Sementara lapangan usaha penghasil jasa kontribusi ekonominya tidak sebesar

penghasil barang, namun perkembangannya cukup menggembirakan. Lapangan usaha tersebut antara lain Jasa Perusahaan dan Informasi & Komunikasi. Hal ini menunjukkan lapangan usaha penghasil jasa juga perlu menjadi perhatian untuk dikembangkan lebih jauh.

Dilihat berdasarkan skala usaha (ukuran), Usaha Mikro Kecil (UMK) mendominasi aktivitas ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya dengan proporsi sekitar 99,68 persen. Keunggulan sektor UMK ini mampu menampung tenaga kerja Kabupaten Tasikmalaya yang jumlahnya melimpah. Meskipun tidak menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi, aktivitas UMK mempunyai fleksibilitas yang tinggi dalam inovasi dan operasional usahanya sehingga memungkinkan memenuhi kebutuhan konsumen dengan cepat. UMK juga lebih bisa menyesuaikan proses produksi selama krisis dan tidak terlalu tergantung pada pasar-pasar dan kredit formal sehingga kelompok usaha ini merespon lebih cepat dan luwes terhadap guncangan-guncangan yang muncul mendadak (Berry dkk, 2011 dikutip dalam Tambunan, 2009).

Sementara itu, Usaha Menengah Besar (UMB) di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 610 perusahaan. Jika dirinci menurut lapangan usaha, sebaran UMB terbesar berada pada kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran (Kategori G) mencapai 43,28 persen. Kemudian kategori lapangan usaha Keuangan (Kategori K) mencapai 26,39 persen dan lapangan usaha Industri Pengolahan (Kategori C) sebanyak 8,20 persen dari total UMB non pertanian di Kabupaten Tasikmalaya. Sementara untuk sebaran UMB terbanyak di Jawa Barat berada di Kota Bandung (15,50%), Kota Bekasi (13,51%), Kabupaten Bogor (9,03%), Kabupaten Bekasi (7,44%), Kabupaten Bandung (6,33%), dan Kabupaten Karawang (4,23%). Wilayah Priangan Timur sendiri yang terdiri dari Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar hanya mencapai 7,17 persen.

Grafik 1.8. Distribusi Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Usaha Menengah Besar (UMB) Menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur Tahun 2016 (%)



Sumber: Hasil SE2016 Listing, BPS Provinsi Jawa Barat



Bab 2



**TANTANGAN KABUPATEN
PEMBANGUNAN EKONOMI
TASIKMALAYA**

BAB II

TANTANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN TASIKMALAYA

Kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya tumbuh solid pada gilirannya mempengaruhi kinerja harga komoditas global yang masih rendah, meski akan sedikit naik dibandingkan tahun sebelumnya. Momentum pemulihan ekonomi global semakin kuat di tahun 2016 yang ditandai oleh kian meningkatnya laju pertumbuhan meskipun ekonomi global dihadapkan pada sejumlah tantangan yang cukup berat. Peningkatan pertumbuhan lebih didorong oleh negara-negara maju yang mengalami pertumbuhan, sementara negara berkembang relatif tumbuh stabil.

Beberapa tantangan yang dihadapi ekonomi global adalah meningkatnya faktor ketidakpastian terkait dengan kenaikan *Fed Fund Rate* dan pemilihan presiden di AS. Hal itu berdampak langsung pada gejolak di pasar keuangan dan lebih jauh lagi dapat menahan aktivitas ekonomi. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS masih menimbulkan ketidakpastian yang bersumber dari ekspektasi kebijakan yang akan diambil yang diperkirakan akan semakin protektif dan terfokus pada kepentingan AS namun mengabaikan ekonomi global.

Dengan perkembangan ekonomi global yang baru mulai membaik (*rebound*) dan besarnya tantangan ekonomi global ke depan, pihak otoritas di berbagai negara pada umumnya tetap mempertahankan *stance* kebijakan yang cenderung akomodatif, kecuali kebijakan moneter AS yang mulai memasuki siklus pengetatan. Selain AS, Tiongkok juga mulai menunjukkan sinyal pengetatan melalui beberapa instrumen kebijakannya. Berbagai perkembangan tersebut pada akhirnya menjadikan ekonomi global

berpotensi untuk tumbuh lebih tinggi ke depan, apabila berbagai risiko dan tantangan yang ada dapat dikelola dengan baik.

Prospek ekonomi global yang masih belum akan pulih segera dan ketidakpastian di harga komoditas dan pasar keuangan akan menjadi tantangan bagi perekonomian Nasional. Di sisi lain, tantangan jangka pendek dan struktural domestik yang belum terselesaikan berpotensi menghambat proses pemulihan ekonomi.

Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas tantangan dan prospek regional Jawa Barat. *Pertama*, mencermati respon pemerintah terhadap tantangan global dan Nasional. Memperhatikan perkembangan perekonomian global diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa penting mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat resiliensi (ketahanan) perekonomian Nasional. Di sektor domestik, perlu terus dibangun industri yang kuat dan berdaya saing di rumah sendiri. Sementara dari sektor eksternal, perlu disiapkan berbagai sektor unggulan yang berdaya saing di pasar global sekaligus mempunyai produktivitas tinggi.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi Nasional. Potensi pertama adalah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan kebijakan makroekonomi, terutama pengelolaan kebijakan fiskal yang bervisi jangka menengah panjang dan kebijakan moneter yang berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi, serta kontinuitas berbagai kebijakan reformasi struktural pemerintah yang telah dilakukan selama ini menjadi faktor-faktor penopang utama bagi keyakinan para pelaku ekonomi. Potensi kedua yang mengemuka dan perlu mendapat catatan khusus pada tahun 2016

ialah munculnya sumber pembiayaan ekonomi yang luar biasa melalui program Pengampunan Pajak. Perluasan basis pajak yang dicapai melalui program Pengampunan Pajak diharapkan diikuti intensifikasi pajak guna semakin meningkatkan peran pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Potensi ketiga ialah potensi teknologi digital yang berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kegiatan *sharing economy* dan *digital economy* yang meningkat pesat sebagaimana tercermin dari aktivitas *fintech* (*financial technology*) dan *e-commerce*. Perkembangan positif ini bila dimanfaatkan dengan tepat akan dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung kegiatan ekonomi domestik.

Ketiga potensi ekonomi tersebut, apabila dapat diberdayakan dengan efektif dan optimal, akan semakin memperkuat dan menggandakan manfaat dari potensi sumber daya domestik yang sebelumnya sudah ada, yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam kaitan ini pula, bonus demografi yang direpresentasikan dengan populasi penduduk usia produktif yang lebih besar dari penduduk usia lanjut dan anak-anak akan menjadi potensi dari sisi tenaga kerja, sekaligus basis konsumen yang kuat sejalan dengan meningkatnya kelas menengah di Indonesia. Bonus demografi ini jika dikelola dengan tepat akan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi lebih sejahtera.

Kedua,antisipasi kebijakan pemerintah terkait *administered price*. Kondisi tahun 2017, melihat perkembangan *update* kondisi terakhir tahun 2016 baik. Namun demikian, tantangan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2017 tidak lebih mudah dibandingkan tahun 2016. Perkembangan peran pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2017 diantaranya diperkirakan akan menghadapi tantangan menuju keseimbangan baru sebagai dampak dari kenaikan sejumlah komoditas yang harganya diatur pemerintah, seperti kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) kelompok rumah

tangga konsumen 900 VA, penyesuaian harga BBM non subsidi serta perubahan harga gas elpiji 3 Kg dan perubahan-perubahan harga komoditas lainnya yang dinamis. Peran kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga secara umum diperkirakan akan sangat tergantung pada kondisi tingkat inflasi tahun ini.

Ketiga, ekspektasi lingkungan bisnis. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diperkirakan masih akan tumbuh positif, sejalan dengan ekspektasi kenaikan pertumbuhan kredit, perbaikan kondisi lingkungan investasi dan perekonomian serta dampak dari relaksasi kebijakan pemerintah melalui implementasi paket-paket kebijakan ekonomi.

Keempat, harapan efektivitas kebijakan fiskal. Pengeluaran konsumsi pemerintah juga diharapkan bisa optimal tahun ini, sejalan dengan percepatan realisasi anggaran dan kemungkinan tidak adanya skenario fiskal pemerintah pusat terkait penundaan pencairan dana perimbangan. Adanya pencairan dana tahap satu terkait persiapan pilkada serentak, peningkatan pembangunan dan penyelesaian infrastruktur-infrastruktur strategis di Jawa Barat diperkirakan akan berdampak positif terhadap kinerja serta kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah.

Kelima, terkait kondisi ekspor dan impor (*net ekspor*) yang diperkirakan juga masih akan tumbuh positif, sejalan dengan perbaikan terbatas ekonomi global. Meningkatnya harga minyak dunia dan perbaikan daya beli konsumen negara-negara timur tengah diharapkan bisa meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat Tahun 2017. Fluktuasi kurs yang mengarah kepada stabilitas dan keseimbangan baru diharapkan bisa mendorong daya saing komoditas ekspor Jawa Barat, disisi lain peningkatan nilai ekspor dapat dikendalikan sejalan dengan penguatan industri hulu regional terkait kontribusi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Keenam, terkait reformasi fiskal dan melanjutkan reformasi struktural tahap kedua. Reformasi fiskalnya berbentuk : (1) Belanja yang lebih baik, (2) Pengurangan subsidi dan penargetannya yang lebih baik, (3) Penambahan dana dan dengan insentif yang lebih baik bagi pemerintah daerah, dan (4) Strategi penerimaan jangka menengah yang fokus pada keberlanjutan. Sementara itu, reformasi strukturalnya diarahkan untuk : (1) Meningkatkan Investasi infrastruktur, termasuk swasta, (2) Perbaikan kondisi bisnis (antara lain EODB), (3) Logistik yang lebih baik, (4) Perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi, (5) Kebijakan pertanahan/reformasi agraria, (6) Kebijakan industrialisasi, hilirisasi industri dan industri pariwisata, dan (7) Deregulasi peraturan/ijin di daerah.

Ketujuh, terkait belanja infrastruktur. Proyek infrastruktur yang akan dikembangkan adalah : (1) jalan, (2) Jembatan, (3) Bandara (yang salah satunya ada di Kabupaten Majalengka), (4) Pelabuhan Laut, (5) Rel Kereta Api, dan (6) Terminal Bus. Arah belanja tersebut disertai dengan reformasi fiskal, institusional, dan regulasi. Bahkan Pemerintah Pusat akan melakukan relokasi belanja subsidi dan infrastruktur pada tahun 2017. Penurunan subsidi akan direlokasi untuk kebutuhan belanja infrastruktur yang memiliki multiplier besar terhadap perekonomian, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 6 persen.

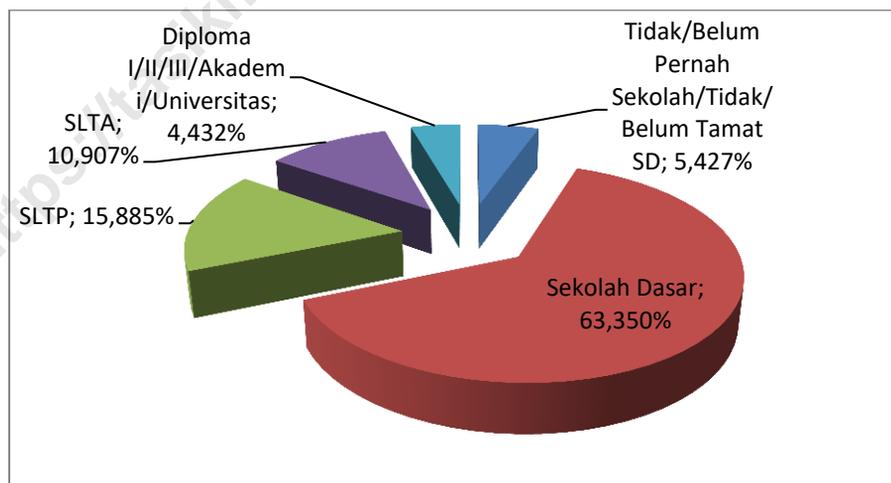
Kualitas SDM Menjadi Tantangan Pembangunan Ekonomi

Michael P Todaro dan Smith (2003) mengungkapkan bahwa terdapat tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia, (2) pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan menambah jumlah

angkatan kerja, serta (3) kemajuan teknologi. Smith (2003) juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja saling berkaitan dan menguatkan. Namun, untuk menciptakan ekonomi yang kuat, tenaga kerja yang berkualitas adalah syarat yang harus dipenuhi. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2015 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tenaga kerja Kabupaten Tasikmalaya masih rendah, karena sebagian besar berpendidikan SLTP kebawah (15,88 persen). Tenaga kerja yang berpendidikan SD sekitar 63,35 persen, bahkan masih terdapat 5,43 persen yang tidak tamat SD (Grafik 2.1).

Tenaga kerja dengan kualitas pendidikan yang rendah, akan berdampak pada rendahnya daya tawar tenaga kerja Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut akan menyebabkan tidak tertampungnya mereka pada lapangan pekerjaan yang lebih profesional yang mensyaratkan keahlian dan kualifikasi tinggi.

Grafik 2.1. Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2015

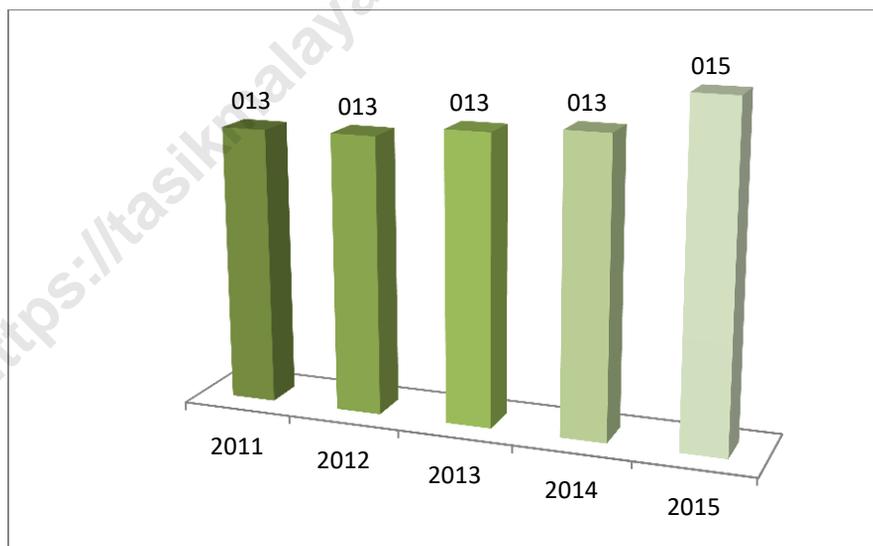


Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2015, BPS Provinsi Jawa Barat

Pendidikan dan latihan dipandang sebagai suatu investasi di bidang sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Todaro, 2014). Meskipun tenaga kerja di Kabupaten Tasikmalaya masih didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan SMP ke bawah, namun berdasarkan data Sakernas 2011-2015, tenaga kerja berpendidikan SMA ke atas meningkat selama rentang tahun tersebut.

Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja, maka semakin tinggi pula produktivitas yang bisa dicapainya. Tenaga kerja yang memiliki pendidikan SMA ke atas meningkat dari 12,57 persen pada tahun 2011 menjadi 15,34 persen pada tahun 2015.

Grafik 2.2. Persentase Tenaga Kerja dengan Pendidikan SMA Keatas, di Kabupaten Tasikmalaya 2011-2015



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2011-2015, BPS Provinsi Jawa Barat

Sesungguhnya, pendidikan meningkatkan produktivitas secara tidak langsung. SDM yang berpendidikan menggunakan sumber daya lain lebih efisien sehingga menjadi lebih produktif. Dengan pendidikan pula proses produksi menjadi lebih baik. Kesimpulannya, peningkatan pendidikan akan meningkatkan efisiensi seluruh faktor produksi. Hal inilah yang membedakan antara negara kaya dan negara miskin. Negara miskin tidak mampu meningkatkan produktivitas karena investasi SDM yang rendah dan tidak mampu mengadopsi teknologi yang baru. Disamping itu, hal ini terjadi karena tabungan domestik dan sumber daya keuangan eksternal yang minim (UNDP, 1996).

Ketidakmerataan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara produsen dan konsumen (Pearce, 1996). Dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, infrastruktur merupakan elemen yang sangat dibutuhkan (Hirschman, 1958). Bank Dunia (1994) membagi infrastruktur kedalam 3 jenis yaitu infrastruktur ekonomi, sosial, dan administrasi/institusi. Infrastruktur ekonomi meliputi *public utilities* (telekomunikasi, air minum, sanitasi, dan gas); *public works* (bendungan, saluran irigasi, dan drainase), serta transportasi (jalan, kereta api, pelabuhan, dan lapangan terbang). Sementara infrastruktur sosial meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Sedangkan infrastruktur administrasi/institusi seperti penegakan hukum, kontrol administrasi, dan lain sebagainya.

Ketersediaan infrastruktur seperti sarana transportasi dan komunikasi mendukung peningkatan produktivitas dari dua sisi, baik dari input maupun output. Dari sisi output, infrastruktur merupakan hal penting dalam

menunjang proses produksi dan distribusi yang nantinya akan berdampak pada peningkatan output. Dari sisi input tenaga kerja, infrastruktur transportasi dan komunikasi juga merupakan sarana untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas tenaga kerja. Sayangnya, keberadaan infrastruktur tersebut di Jawa Barat cukup bervariasi antar wilayah. Di bagian selatan, keberadaannya belum merata di seluruh wilayah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk meningkatkan produktivitas dari sisi produksi.

Dari sisi pembangunan keterampilan tenaga kerja, infrastruktur pendidikan dan pelatihan sangat vital dalam peningkatan produktivitas. Sayangnya, aspek geografis dan ketidakmerataan pembangunan infrastruktur ini menjadi permasalahan lain dalam pembangunan ekonomi kewilayahan.

Sebagai contoh salah satu infrastruktur ekonomi yaitu ketersediaan jalan antar wilayah di Kabupaten Tasikmalaya masih belum merata. Perbedaan terlihat antara kabupaten/kota di sekitar ibukota provinsi dan ibukota negara dengan Jawa Barat bagian selatan. Di ibukota provinsi, Kota Bandung memiliki rasio panjang jalan terhadap luas wilayah sebesar 7,425. Artinya di setiap 1 km² luas wilayah terdapat 7.425 meter panjang jalan. Di sekitar ibukota negara, Kota Bogor dan Kota Bekasi memiliki rasio panjang jalan terhadap luas wilayah masing-masing sebesar 6,522 dan 6,584. Angka ini berbeda jauh jika dibandingkan dengan wilayah Jawa Barat bagian selatan, seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Rata-rata panjang jalan di Kabupaten Garut hanya 392 meter pada setiap 1 km² wilayah. Di Kabupaten Sukabumi panjang jalan hanya 414 meter pada setiap 1km² wilayah. Kondisi ini merupakan realita ketidak merataan pembangunan infrastruktur di Propinsi Jawa Barat.

Apabila dilihat dari sisi rasio panjang jalan per kabupaten di Propinsi Jawa Barat, rasio panjang jalan di setiap 1 km² maka Kabupaten Tasikmalaya

berada pada tingkat ke 20 tertinggi di antara kabupaten kota lainnya di Propinsi Jawa Barat. Dengan rasio panjang jalan sebanyak 591 meter posisi Kabupaten Tasikmalaya ini lebih tinggi dari beberapa kabupaten lainnya seperti, Indramayu, Bandung Barat, Cianjur, Ciamis, dan Sukabumi. Potensi hasil pemasaran hasil produksi penduduk di Kabupaten Tasikmalaya seharusnya jauh lebih baik daripada beberapa kabupaten yang rasio panjang jalannya lebih pendek.

Total panjang jalan di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 1.507,62 km. Sepanjang 80,65 km kewenangan pengelolaannya adalah pemerintah pusat (jalan nasional), sepanjang 123,65 km Jalan provinsi, dan sepanjang 1.303,32 km adalah jalan kabupaten.

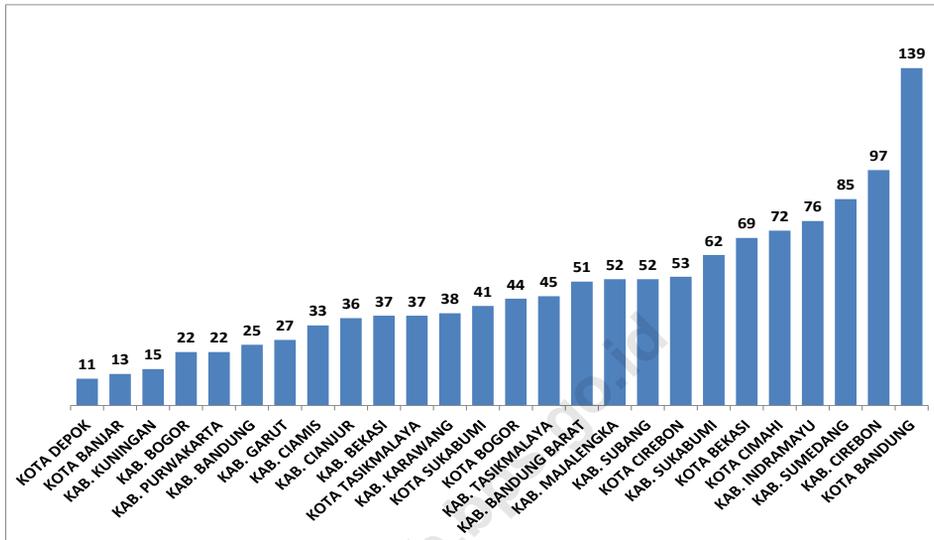
Jalan Kabupaten sepanjang 1.303,32 km tercatat sebesar 26,15 persen dalam kondisi baik, 20,79 persen jalan tercatat dalam kondisi sedang, 32,37 persen dalam kondisi rusak, dan sisanya 32,37 persen dalam kondisi rusak berat.

Tabel 2.1.
Rasio Panjang Jalan (Km) Terhadap Luas Wilayah (Km²)
Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2016

Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Km ²)	Panjang Jalan (Km)	Rasio	Rank Rasio Panjang Jalan
[01] BOGOR	2.710,62	1.953,64	0,721	17
[02] SUKABUMI	4.145,70	1.716,05	0,414	25
[03] CIANJUR	3.840,16	1.700,34	0,443	23
[04] BANDUNG	1.767,96	1.388,55	0,785	15
[05] GARUT	3.074,07	1.204,88	0,392	27
[06] TASIKMALAYA	2.551,19	1.507,62	0,591	20
[07] CIAMIS	1.414,71	594,68	0,420	24
[08] KUNINGAN	1.110,56	944,30	0,850	12
[09] CIREBON	984,52	817,47	0,830	13
[10] MAJALENGKA	1.204,24	883,64	0,734	16
[11] SUMEDANG	1.518,33	972,48	0,640	19
[12] INDRAMAYU	2.040,11	1.085,26	0,532	21
[13] SUBANG	1.893,95	1.244,53	0,657	18
[14] PURWAKARTA	825,74	829,60	1,005	11
[15] KARAWANG	1.652,20	1.726,12	1,045	10
[16] BEKASI	1.224,88	1.001,65	0,818	14
[17] BANDUNG BARAT	1.305,77	688,77	0,527	22
[18] PANGANDARAN	1.010,00	407,16	0,403	26
[71] BOGOR	118,5	772,84	6,522	3
[72] SUKABUMI	48,25	178,27	3,695	5
[73] BANDUNG	167,67	1.244,88	7,425	1
[74] CIREBON	37,36	157,76	4,223	4
[75] BEKASI	206,61	1.360,24	6,584	2
[76] DEPOK	200,29	520,25	2,597	7
[77] CIMAH	39,27	119,00	3,03	6
[78] TASIKMALAYA	171,61	435,64	2,539	8
[79] BANJAR	113,49	287,40	2,532	9
[32] JAWA BARAT	35.377,76	25.743,04	0,728	

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka 2017, BPS Provinsi Jawa Barat

Grafik 2.3. Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2017



Sumber: <http://www.binalattas.info>, Direktorat Bina Lemsar (April 2017)

Sementara itu dari sisi ketersediaan infrastruktur sosial yang berdampak pada produktivitas tenaga kerja juga terjadi kesenjangan antar wilayah. Sebagai contoh adalah infrastruktur pendidikan dan pelatihan kerja. Indikator jumlah lembaga penyelenggara pelatihan kerja seperti Balai Pengembangan Produktivitas Daerah (BPPD), Balai Latihan Kerja (BLK), dan Balai Latihan Transmigrasi (Balatrans) dapat dijadikan acuan untuk menggambarkan keberadaan sarana pendidikan dan pelatihan tersebut. Saat ini, jumlahnya 326 yang tersebar di 34 provinsi. Di Jawa Barat sendiri terdapat 21 BLK, serta 1 BPPD. Idealnya, lembaga-lembaga ini tersedia sampai level kabupaten/kota dengan jumlah yang cukup. Namun demikian, sarana pelatihan tenaga kerja yang dapat membantu dalam meningkatkan *skill* atau kapabilitas calon tenaga kerja dari lembaga swasta tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Sementara di Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebanyak 45 lembaga pelatihan kerja swasta yang tersebar di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

<https://tasikmalayakab.bps.go.id>



Bab 3

**PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI
LOKAL UNTUK PEMERATAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN
TASIKMALAYA**

BAB III

PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL UNTUK PEMERATAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Optimalisasi Sektor Potensial untuk Pemerataan Pembangunan

Ketersediaan akan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, modal, tenaga kerja dan teknologi menentukan keunggulan komparatif suatu wilayah. Potensi-potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki suatu wilayah tersebut akan mempengaruhi efisiensi dari nilai ekonomi yang dikembangkan berdasarkan potensi-potensi tersebut. Untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang berkualitas, pemerintah perlu mengoptimalkan keunggulan komparatif wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dengan demikian produk barang atau jasa yang dikembangkan akan lebih efisien sehingga mempunyai daya saing dan keunggulan kompetitif yang tinggi baik di tingkat domestik maupun regional.

Untuk mencapai daya saing perekonomian dan keunggulan kompetitif, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 semua elemen pembangunan harus terkonsep untuk mengacu ke hal tersebut. Oleh karenanya diperlukan efisiensi di semua elemen pembangunan yang meliputi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan infrastruktur. Namun demikian tidak sedikit kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan elemen-elemen tersebut. Salah satunya adalah adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Faktanya, saat ini wilayah sekitar ibukota negara dan sekitar ibukota provinsi masih

mendominasi kegiatan ekonomi Jawa Barat dengan kontribusi yang mencapai 60 persen PDRB Jawa Barat. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang banyak terjadi di negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan kondisi demografi dan kandungan SDA (Sjafrizal, 2008). Salah satu upaya strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah dengan konsep pembangunan berdimensi wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), yaitu WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Kawasan Khusus (KK) Cekungan Bandung. Kabupaten Tasikmalaya termasuk ke dalam bagian WP Priangan Timur.

Fokus pembangunan Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2016-2021 diarahkan untuk : 1. Melaksanakan program unggulan yang menjadi tema utama (*dedicated*) pembangunan Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021; 2. Melaksanakan program-program dalam mendukung pencapaian target Nasional (SDGs, dan Nawacita serta *Common Goal* Jawa Barat); 3. Penanganan bencana secara terpadu dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mengutamakan mitigasi bencana serta peningkatan kerjasama lintas SKPD; 4. Melaksanakan optimalisasi penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; 5. Mengembangkan industri kreatif pariwisata berbasis event (ekonomi, olahraga, seni dan budaya) dan berbasis alam, serta Desa Wisata 6. Fasilitasi pembentukan Kabupaten Tasikmalaya Selatan; dan 7. Mewujudkan desa yang maju, sejahtera dan demokratis melalui paradigma Desa membangun dan membangun Desa (Gerbang Desa).

Pada Kebijakan kewilayahan yaitu arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, oleh karena itu kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Tasikmalaya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

- 1.pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian;
2. pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
- 3.pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
4. pengembangan sistem perkotaan – perdesaan;
5. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
- 6.optimalisasi potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang;
- 7.pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, dan pembangunan berkelanjutan; dan
- 8.peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berdimensi kewilayahan maka optimalisasi potensi kewilayahan menjadi suatu keharusan dan menarik untuk dianalisis. Hal ini dilatarkbelakangi oleh fakta bahwa WP Bodebekpunjur dan WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung mendominasi kegiatan ekonomi Jawa Barat dengan kontribusi yang mencapai 60 persen PDRB Jawa Barat. Namun demikian, sesungguhnya WP lain memiliki potensi ekonomi dari sisi keberlanjutan pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi di WP luar WP Bodebekpunjur dan WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung ternyata

memiliki capaian yang cukup menggembirakan. Oleh sebab itu, penggalan potensi ekonomi sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian dari konsep pembangunan kewilayahan. Harapannya konvergensi ekonomi dapat dicapai terutama dengan mendorong transformasi dan akselerasi.

Tabel 3.1. Kontribusi PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya, 2011-2016

TAHUN	PDRB KAB TASIKMALAYA	PDRB PROPINSI JAWA BARAT	PERAN PDRB KAB TASIKMALAYA THDP PDRB JAWA BARAT (%)	LPE KAB TASIKMALAYA	LPE PROPINSI JAWA BARAT
2011	17.558.913	1.021.628.597,37	1,72	4,25	6,50
2012	19.030.091	1.128.245.684,62	1,69	4,02	6,50
2013	21.272.802	1.258.989.328,78	1,69	4,65	6,33
2014	23.238.433	1.385.825.076,49	1,68	4,77	5,09
2015	25.675.173	1.524.832.201,52	1,68	4,31	5,04
2016	28.018.170	1.652.589.443,18	1,70	5,91	5,67

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tasikmalaya, BPS Kabupaten Tasikmalaya.

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang berlangsung cepat di daerah perkotaan memberikan peluang sekaligus tantangan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Nilai tambah ekonomi yang besar di perkotaan yang dihasilkan dari aglomerasi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat memberikan peluang bagi upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan yang pesat ini memerlukan berbagai terobosan yang bersifat kreatif dan inovatif, khususnya dalam meningkatkan daya saing wilayah.

Untuk keperluan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan dengan optimalisasi sektor unggulan dibutuhkan data yang akan menjadi acuan bagi penentuan program-program yang tepat guna dan tepat sasaran. Salah satu kegiatan Sensus Ekonomi 2016 (SE 2016) adalah Pendaftaran Rumah tangga SE 2016 (SE2016-L). Hasil SE2016-L merupakan data dasar yang akan memberikan gambaran yang jelas tentang struktur dan potensi kegiatan usaha di Kabupaten Tasikmalaya.

Potensi Ekonomi Regional

Dalam mengembangkan potensi ekonomi wilayah di Kabupaten Tasikmalaya plan dan kebijakan. Salah satunya tertuang dalam RPJMD 2016-2021 serta dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 yaitu Rencana Pengembangan Wilayah yang berbasis potensi ekonomi wilayah, yang disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Selain berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan kewilayahan, potret potensi ekonomi di suatu wilayah dapat dipetakan berdasarkan data yang akurat berdasarkan potensi sumber dayanya. Keunggulan komparasi antar wilayah menjadi menarik untuk dikaji, sehingga pemetaan komoditas atau kegiatan ekonomi di suatu wilayah menjadi lebih jelas dan tepat.

Setiap wilayah mempunyai komoditas-komoditas unggul yang akan diintegrasikan dengan kegiatan ekonomi sehingga menghasilkan produk-produk yang lebih efisien dan berdaya saing. Berdasarkan pemikiran Salvatore (2007) mengenai keunggulan komparatif, dapat dianalogkan bahwa wilayah yang memiliki keunggulan komparatif didasarkan pada rendahnya *opportunity cost* dalam menghasilkan suatu produk. Jika suatu proses produksi dengan bahan baku dari wilayah yang bersangkutan akan sangat efisien dan

menurunkan *opportunity cost*. Dengan demikian produk tersebut akan lebih mudah bersaing baik pada pasar domestik maupun global. Oleh sebab itu menakar potensi ekonomi di suatu wilayah merupakan langkah awal untuk menghasilkan produk yang dapat bersaing sekaligus akan meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat.

Data hasil SE2016 mampu menakar potensi ekonomi tersebut sampai pada level kabupaten/kota. Data SE2016 juga menyediakan informasi mengenai aktivitas ekonomi dan tenaga kerja seluruh sektor di luar pertanian hingga level administrasi terkecil. Oleh sebab itu, informasi ini sangat penting dalam mengukur potensi dari nilai ekonomi di suatu wilayah. Ketersediaan data yang lengkap jika ditunjang oleh metodologi yang tepat akan menghasilkan informasi yang bermanfaat.

Untuk mengukur potensi ekonomi di suatu wilayah terdapat tiga metode yaitu:

1. *Regional Account (Income – Expenditure) Approach* yang mengukur nilai ekonomi dari suatu wilayah berdasarkan produk atau kegiatan ekonomi pada setiap sektor di suatu wilayah.
2. *Input – Output Approach*: yang mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah dari nilai pemanfaatan faktor produksi atau input baik yang tersedia di wilayah tersebut maupun yang berasal dari wilayah lain untuk menghasilkan output tertentu.
3. *Economic Base Approach* yaitu dengan mengukur nilai produksi, aktivitas ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi sehingga menghasilkan kelompok struktur perekonomian daerah menjadi sektor unggulan dan bukan unggulan

Pengukuran potensi ekonomi di suatu wilayah berdasarkan data SE2016 dapat menggunakan pendekatan teori *Economic Base Approach*. Teori ini

didasarkan pada perkembangan peran sektor ekonomi, baik di dalam wilayah maupun ke luar wilayah terhadap pertumbuhan perekonomian wilayah tersebut. Dari metode tersebut kemudian dikelompokkan menjadi dua sektor yaitu sektor unggulan dan sektor bukan unggulan.

Konsep dasar *economic base* terletak pada asumsi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah ditentukan oleh pertumbuhan ekspor dari wilayah yang mampu mendatangkan pendapatan dari luar wilayah. Sektor-sektor yang kinerja ekspornya baik dan tumbuh pesat dikategorikan sebagai *base activities/sectors* (sektor unggulan). Sebaliknya, kategori lapangan usaha yang tidak memiliki performa ekspor yang tinggi dapat dikategorikan sebagai *non-base sectors* (sektor bukan unggulan). Analisis dari sektor unggulan dan bukan unggulan didasarkan pada nilai tambah atau lapangan pekerjaan yang diciptakan (jumlah tenaga kerja yang terserap).

Untuk mendapatkan sektor/kategori unggulan di suatu wilayah, beberapa metode pengukuran yang umum digunakan antara lain *Location Quotient* (LQ), Analisis *Shift-Share*, Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan Tipologi Klassen. Penjelasan mengenai metode-metode tersebut dapat dilihat di catatan teknis.

Pemetaan Hasil Pengukuran Potensi Ekonomi Regional

Potensi Wilayah Hasil Pengukuran LQ

LQ digunakan untuk melihat sektor basis maupun non basis. Jika suatu sektor mempunyai angka $LQ > 1$ maka sektor tersebut merupakan sektor basis, sebaliknya suatu sektor mempunyai angka $LQ < 1$ maka sektor tersebut sektor non basis. Suatu sektor dikatakan sektor basis

mengindikasikan sektor tersebut merupakan sektor unggulan/potensial, yang berpotensi ekspor. Sebaliknya sektor non basis merupakan sektor bukan unggulan dan tidak berpotensi ekspor.

Hasil pengolahan LQ terhadap jumlah usaha menurut skala (UMK-UMB) diperoleh informasi bahwa hanya Kota Tasikmalaya mempunyai sektor basis skala UMB di Priangan Timur, sedangkan sisanya sebanyak 5 kabupaten termasuk Kabupaten Tasikmalaya mempunyai sektor basis pada usaha berskala UMK.

Tabel 3.2 Hasil LQ Jumlah Usaha UMB dan UMK Kabupaten/Kota di Priangan Timur, 2016

Kabupaten/Kota	LQ Jumlah Usaha		Sektor Basis
	UMK	UMB	
[1]	[2]	[3]	[4]
3205 Garut	1,01027	0,32852	UMK
3206 Tasikmalaya	1,01201	0,21522	UMK
3207 Ciamis	1,00918	0,39988	UMK
3218 Pangandaran	1,01020	0,33346	UMK
3278 Kota Tasikmalaya	0,99719	1,18344	UMB
3279 Kota Banjar	1,00185	0,87889	UMK

Sumber: Hasil SE2016 Listing, BPS Provinsi Jawa Barat, diolah

Kabupaten yang berpotensi pada usaha UMK sebagian besar bergantung pada perekonomian agraris atau pertanian. Namun jumlah usaha berskala UMK non pertaniannya cukup banyak dan berkembang di wilayah itu. Meski UMK lebih menonjol, justru itu yang menunjukkan adanya kemandirian ekonomi yang cukup baik. Kepemilikan UMK umumnya adalah milik masyarakat setempat karena kepermodalannya dari modal sendiri. Berbeda dengan UMB, tidak seluruhnya UMB kepermodalannya milik masyarakat setempat, tetapi bisa jadi milik warga luar Kabupaten Tasikmalaya atau luar

Jawa Barat bahkan milik asing.

Hasil perhitungan LQ jumlah usaha menurut skala Kabupaten Tasikmalaya untuk UMB sebesar 0,21522, sedangkan untuk UMK 1,01201. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Tasikmalaya usaha dengan skala UMK lebih menonjol.

Tabel 3.3 Hasil LQ Jumlah Tenaga Kerja UMB dan UMK Kabupaten/Kota di Priangan Timur, 2016

Kabupaten/Kota	LQ Jumlah Usaha		Sektor Basis
	UMK	UMB	
[1]	[2]	[3]	[4]
3205 Garut	1,22823	0,32851	UMK
3206 Tasikmalaya	1,30671	0,09759	UMK
3207 Ciamis	1,25601	0,24678	UMK
3218 Pangandaran	1,28107	0,17304	UMK
3278 Kota Tasikmalaya	1,10326	0,69620	UMK
3279 Kota Banjar	1,06359	0,81290	UMK

Sumber: Hasil SE2016 Listing, BPS Provinsi Jawa Barat, diolah

Hasil sebaran LQ agak berbeda, jika LQ yang dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja. Kota Tasikmalaya yang potensi UMB menurut LQ jumlah usaha, jika dilihat menurut LQ tenaga kerja, potensi pada usaha berskala UMK. Artinya, penyerapan tenaga kerja di Kota Tasikmalaya, usaha berskala UMK relatif lebih menonjol dibanding penyerapan tenaga kerja pada skala UMB. Untuk Wilayah Pembangunan Priangan Timur lainnya termasuk Kabupaten Tasikmalaya sendiri, baik pada LQ menurut jumlah usaha maupun pada LQ menurut jumlah tenaga kerja memiliki potensi UMK. Dengan demikian penyerapan tenaga kerja untuk skala usaha UMK lebih menonjol dibandingkan UMB di Kabupaten Tasikmalaya.

Untuk LQ berdasarkan tenaga kerja di Kabupaten Tasikmalaya skala UMK sebesar 1,30671, sedangkan UMB sebesar 0,09759 Hal ini menunjukkan dalam hal penyerapan tenaga kerja, skala UMK lebih dominan di Kabupaten Tasikmalaya.

Potensi Hasil Pengukuran LQ Menurut Kategori

Ada hal yang menarik lainnya yang bisa dilihat dari hasil analisis LQ hasil listing SE2016 jumlah usaha. Yaitu sebaran potensi suatu kategori di Jawa Barat. Meskipun demikian, perlu kehati-hatian dalam membaca hasil LQ tersebut. Karena didasarkan dari jumlah usaha, maka wilayah yang mempunyai usaha terbanyak dalam suatu kategori, akan cenderung disimpulkan sebagai wilayah yang mempunyai potensi ekonomi pada kategori tersebut.

Dengan kata lain, suatu wilayah yang mempunyai usaha di suatu kategori dengan jumlah sedikit tetapi mempunyai output yang besar, tidak akan begitu nampak pada analisis LQ. Sebaliknya wilayah dengan jumlah usaha yang besar, meskipun outputnya tidak begitu besar, akan dibaca oleh LQ sebagai usaha yang potensial.

Pengguna data juga harus hati-hati dalam membaca kategori yang disebut sebagai sektor potensi/unggulan. Beberapa kategori tidak berdiri sendiri, tetapi gabungan dari beberapa kategori, bahkan untuk analisis beberapa kategori digabungkan. Sebagai contoh, kategori B terdiri dari sektor Pertambangan dan Penggalian. Ketika suatu wilayah dikatakan potensi pada kategori B, yang menonjol bukan berarti kedua-duanya (Pertambangan dan Penggalian), tetapi bisa jadi yang menonjol pertambangannya saja atau penggaliannya saja. Demikian pula untuk gabungan kategori, misalnya

kategori D dan E, jika dikatakan menonjol atau merupakan sektor basis, bukan mutlak kedua kategori D dan E semuanya sektor basis, tetapi bisa salah satu kategori atau salah satu kategori yang terdapat dalam kategori tersebut.

Dengan kata lain, suatu wilayah yang mempunyai usaha di suatu kategori dengan jumlah sedikit tetapi mempunyai output yang besar, tidak akan begitu nampak pada analisis LQ. Sebaliknya wilayah dengan jumlah usaha yang besar, meskipun outputnya tidak begitu besar, akan dibaca oleh LQ sebagai usaha yang potensial.

Pengguna data juga harus hati-hati dalam membaca kategori yang disebut sebagai sektor potensi/unggulan. Beberapa kategori tidak berdiri sendiri, tetapi gabungan dari beberapa kategori, bahkan untuk analisis beberapa kategori digabungkan. Sebagai contoh, kategori B terdiri dari sektor Pertambangan dan Penggalian. Ketika suatu wilayah dikatakan potensi pada kategori B, yang menonjol bukan berarti kedua-duanya (Pertambangan dan Penggalian), tetapi bisa jadi yang menonjol pertambangannya saja atau penggaliannya saja. Demikian pula untuk gabungan kategori, misalnya kategori D dan E, jika dikatakan menonjol atau merupakan sektor basis, bukan mutlak kedua kategori D dan E semuanya sektor basis, tetapi bisa salah satu kategori atau salah satu kategori yang terdapat dalam kategori tersebut.

Hasil pengolahan LQ terhadap jumlah tenaga kerja menurut kategori lapangan usaha menunjukkan bahwa terdapat tiga kategori lapangan usaha yang memiliki $LQ > 1$. Kategori lapangan usaha dengan $LQ > 1$ adalah : Industri Pengolahan (Kategori C), Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor (Kategori G), Pendidikan (Kategori P).

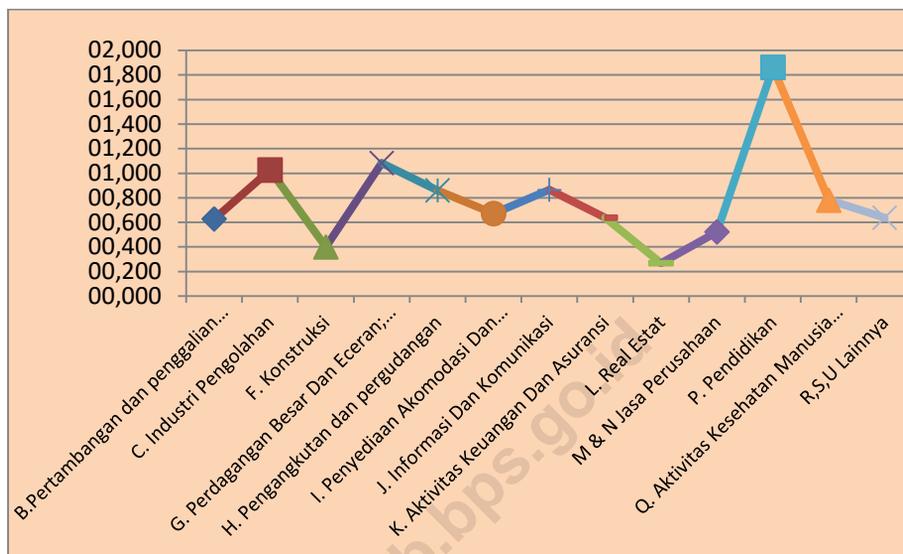
Adapun lapangan usaha yang memiliki $LQ > 1$ sebanyak tiga kategori. Lapangan usaha dengan $LQ > 1$ adalah : Industri Pengolahan (Kategori C), Pendidikan (Kategori P) dan Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial(Kategori Q).

**Tabel 3.4 LQ Tenaga Kerja Menurut Kategori
Di Kabupaten Tasikmalaya**

Kategori	LQ Tenaga Kerja
B. Pertambangan dan penggalian D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0,6279
C. Industri Pengolahan	1,0253
F. Konstruksi	0,4010
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	1,0821
H. Pengangkutan dan pergudangan	0,8595
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	0,6704
J. Informasi Dan Komunikasi	0,8652
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0,6385
L. Real Estat	0,2675
M & N Jasa Perusahaan	0,5225
P. Pendidikan	1,8618
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	0,7816
R,S,U Lainnya	0,6376

Sumber: Hasil SE2016 Listing, BPS Provinsi Jawa Barat, diolah

Grafik 3.1 LQ Tenaga Kerja Menurut Kategori di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016



Sumber: Hasil SE2016 Listing, BPS Provinsi Jawa Barat, diolah

Berdasarkan grafik 3.1 terlihat bahwa kategori yang merupakan kategori unggulan dalam hal penyerapan tenaga kerja adalah kategori P (Pendidikan) dengan nilai LQ sebesar 1,861.8; kategori G (Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor) dengan nilai LQ sebesar 1,082.1 dan kategori C (Industri Pengolahan) dengan nilai LQ sebesar 1,025.3.

Jika dilihat dari hasil $LQ > 1$, perdagangan merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak setelah pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor perdagangan di Kabupaten Tasikmalaya memang paling dominan diminati untuk digeluti memasuki lapangan usaha ini. Perdagangan eceran yang paling banyak seperti tukang kredit yang banyak di jumpai di Kecamatan Pagerageung.

Industri Pengolahan terutama industri mikro kecil menyerap tenaga kerja yang besar pula. Teruma di kecamatan-kecamatan yang merupakan

sentra kerajinan seperti di Kecamatan Rajapolah. Di sana banyak dijumpai pengrajin-pengrajin kerajinan dari pandan dan mendong yang menjadi salah satu andalan produk Kabupaten Tasikmalaya.

Topologi Klassen

Untuk menentukan suatu sektor unggulan dan menguatkan hasil analisis LQ sebelumnya, bisa digunakan analisis topologi Klassen menggunakan data output wilayah (PDRB). Jika analisis LQ menekankan suatu sektor dikatakan sebagai sektor unggulan bergantung banyaknya jumlah usaha, pada analisis topologi Klassen bergantung kontribusi output dan pertumbuhannya.

Sebagai sumbu X-nya digunakan data kontribusi PDRB suatu kategori terhadap total PDRB suatu wilayah. Sumbu Y-nya adalah laju pertumbuhan ekonomi suatu kategori yang menjadi fokus analisis. Titik potong kedua sumbu tersebut adalah kontribusi suatu kategori untuk Kabupaten Tasikmalaya, dan pertumbuhan ekonomi kategori tersebut untuk Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan demikian seluruh angka kategori akan dibandingkan dengan angka Kabupaten Tasikmalaya. Angka kategori yang melebihi angka Kabupaten Tasikmalaya, diduga mempunyai potensi secara ekonomi dibanding kategori lain yang lebih rendah dibanding angka Kabupaten Tasikmalaya.

Intinya pada analisis Klassen, yang terletak pada kuadran I adalah menunjukkan sektor tersebut unggulan, sedangkan yang terletak pada kuadran II dan III menunjukkan sektor tersebut sektor potensial. Kuadran IV menunjukkan sektor yang dianalisis tidak menunjukkan keunggulan dan tidak potensial. Bisa diartikan pada kuadran IV, sektor yang dimaksud sulit untuk dikembangkan atau memang belum pernah digali.

Data yang digunakan pada analisis topologi Klassen, persentase kontribusi kategori dan pertumbuhannya. Sebagai pembanding dipakai kontribusi dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 3.5 Topologi Klassen Kategori di Kabupaten Tasikmalaya

Kategori	Hasil Pengukuran	Kesimpulan
B. Pertambangan dan penggalian D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	Kuadran IV	Merupakan kategori potensial dan masih dapat dikembangkan
C. Industri Pengolahan	Kuadran IV	Merupakan kategori potensial dan masih dapat dikembangkan
F. Konstruksi	Kuadran II	Merupakan kategori unggulan tetapi pertumbuhannya masih tertekan
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	Kuadran I	Merupakan kategori unggulan baik dari pertumbuhan maupun kontribusi
H. Pengangkutan dan pergudangan	Kuadran II	Merupakan kategori unggulan tetapi pertumbuhannya masih tertekan
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	Kuadran III	Bukan sektor potensial dan tertinggal
J. Informasi Dan Komunikasi	Kuadran II	Merupakan kategori unggulan tetapi pertumbuhannya masih tertekan
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	Kuadran I	Merupakan kategori unggulan baik dari pertumbuhan maupun kontribusi
L. Real Estat	Kuadran II	Merupakan kategori unggulan tetapi pertumbuhannya masih tertekan
M & N Jasa Perusahaan	Kuadran II	Merupakan kategori unggulan tetapi pertumbuhannya masih tertekan
P. Pendidikan	Kuadran I	Merupakan kategori unggulan baik dari pertumbuhan maupun kontribusi
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	Kuadran I	Merupakan kategori unggulan baik dari pertumbuhan maupun kontribusi
R,S,U Lainnya	Kuadran II	Merupakan kategori unggulan tetapi pertumbuhannya masih tertekan

Sumber: Hasil SE2016 Listing, BPS Provinsi Jawa Barat, diolah

Analisis Overlay Base Economic Approach

Selain menggunakan analisis LQ dan topologi Klassen, untuk menentukan sektor unggulan bisa dilakukan dengan analisis *overlay base economic approach*. Analisis ini merupakan skoring dari kombinasi analisis LQ, shift-share, model rasio pertumbuhan dan topologi Klassen.

Dalam analisis *overlay base economic approach*, dari setiap analisis di dalamnya dilakukan skoring untuk sektor-sektor unggulan. Pada tahap LQ, sektor dikatakan unggulan jika mempunyai nilai LQ di atas 1, dan diberi skor 1. Untuk tahap shift-share, sektor yang mempunyai daya saing tinggi diberi skor 1, sedangkan untuk model rasio pertumbuhan suatu sektor dikatakan unggulan jika mempunyai pertumbuhan yang baik dalam wilayah analisis maupun wilayah referensi, dan diberi skor 1. Pada topologi Klassen, sektor yang mempunyai kontribusi dan pertumbuhan lebih dari 1 dikatakan sebagai sektor unggulan dan diberi skor 1.

Selanjutnya, dari hasil skoring LQ, shift-share, model rasio pertumbuhan dan topologi Klassen dijumlahkan untuk melihat skor tertinggi. Kategori/sektor yang mempunyai skor tertinggi merupakan sektor unggulan menurut *overlay base economic approach*. Artinya sektor itu benar-benar diunggulkan dari berbagai metode. Penggabungan beberapa metode, ini dimaksudkan karena suatu sektor bisa saja tidak nampak keunggulannya, tetapi dengan metode lainnya nampak keunggulannya.

Suatu metode mungkin ada kelemahan, sehingga perlu disempurnakan dengan metode yang lain. Sebagai contoh, ketika suatu usaha yang jumlahnya sedikit tetapi mempunyai output yang besar, tidak akan tertangkap oleh metode LQ menurut jumlah usaha, padahal dari sisi

kontribusi terhadap output wilayah cukup besar. Output yang besar itu akan tertangkap pada metode shift-share dan topologi Klassen.

Dengan menggunakan keempat metode dalam pengukuran potensi keunggulan sektoral antar wilayah, dilakukan pemetaan hasil berdasarkan wilayah pengembangan dari data SE2016-L. Adapun potret keunggulan menurut wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Sektor Unggulan Berdasarkan Analisis *Overlay Base Economic Approach*

Kategori	LQ	Shift Share		MRP		Klassen	Unggulan / Potensi
		Ps	Ds	RPip	RP _{in} (Referensi)		
B.Pertambangan dan penggalian D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0	0	1	1	0	0	
C. Industri Pengolahan	1	0	1	1	1	1	Unggulan
F. Konstruksi	0	1	0	1	1	0	
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	1	1	1	1	1	1	Unggulan
H. Pengangkutan dan pergudangan	0	1	0	1	1	0	
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	0	1	0	1	1	0	
J. Informasi Dan Komunikasi	0	1	0	1	1	0	
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0	1	1	1	1	1	Unggulan
L. Real Estat	0	0	0	1	1	0	
M & N Jasa Perusahaan	0	1	0	1	1	0	
P. Pendidikan	1	1	1	1	1	1	Unggulan
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	0	1	1	1	1	1	Unggulan
R,S,U Lainnya	0	1	0	1	1	0	

Sumber: Hasil SE2016 Listing, BPS Provinsi Jawa Barat, diolah

Unggulan jika jumlah (LQ TK + LQ saha + Ps + Ds + MRP + Klassen) >3

Berdasarkan analisis *base economic approach*, Kabupaten Tasikmalaya mempunyai sektor unggulan/potensial pada kategori (C) . Industri Pengolahan kategori (G). Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor, kategori (K). Aktivitas Keuangan dan Asuransi, kategori (P). Pendidikan dan kategori (Q). Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial. Banyaknya sektor unggulan dan potensial di Kabupaten Tasikmalaya, menyebabkan daerah ini menjadi tujuan utama mengadu nasib tidak hanya untuk penduduk Kabupaten Tasikmalaya tetapi juga penduduk di luar Kabupaten Tasikmalaya.



Bab 4



INDUSTRI PENGOLAHAN :
PENOPANG EKONOMI KABUPATEN
TASIKMALAYA

BAB IV

INDUSTRI PENGOLAHAN: PENOPANG EKONOMI KABUPATEN TASIKMALAYA

Berdasarkan *International Yearbook of Industrial Statistic* 2016 yang diterbitkan oleh Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Industrial Development Organization/ UNIDO), Indonesia berhasil masuk ke dalam 10 besar negara industri manufaktur terbesar di dunia. Indonesia bahkan mampu melampaui negara industri lain seperti Inggris, Rusia, dan Kanada.

Teori pertumbuhan wilayah yang dikemukakan oleh Kaldor (1966) menyebutkan bahwa sektor industri manufaktur sebagai sektor sekunder merupakan mesin pertumbuhan (*engine of growth*) dalam sistem perekonomian bagi suatu negara (Dasgupta dan Singh, 2006). Oleh karena itu, pertumbuhan sektor industri manufaktur suatu negara dapat dijadikan suatu indikator perkembangan perekonomian negara tersebut.

Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (Arsyad, 1999). Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor.

Potensi Industri Pengolahan

Industri pengolahan di Kabupaten Tasikmalaya, memiliki andil yang cukup besar. Kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Tasikmalaya

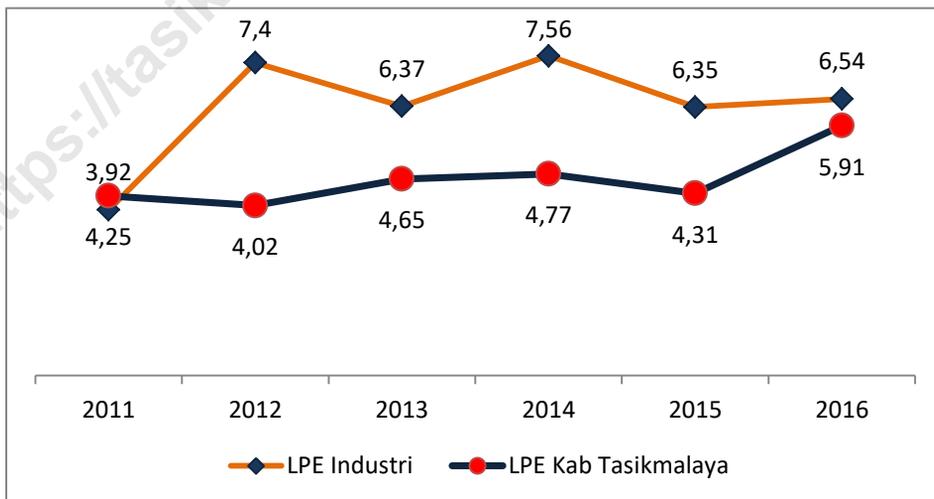
sebesar 6,64 persen di tahun 2011 dan terus mengalami kenaikan hingga 2016 mencapai 7,44 persen.

Tabel 4.1 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan 2011 - 2016

Tahun	Kontribusi Terhadap PDRB (%)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2011	6,64	3,92
2012	6,94	7,40
2013	6,95	6,37
2014	7,28	7,56
2015	7,35	6,35
2016	7,44	6,54

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tasikmalaya, BPS Kabupaten Tasikmalaya

Grafik 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya 2011-2016



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tasikmalaya, BPS Kabupaten Tasikmalaya

Jika dilihat dari pertumbuhan ekonominya, kategori industri pengolahan di Kabupaten Tasikmalaya pada periode 2012 hingga 2016 cenderung berada di atas pertumbuhan PDRB Kabupaten Tasikmalaya. Hanya saja pertumbuhan di tahun 2011 masih dibawah pertumbuhan Kabupaten Tasikmalaya.

Dari hasil pencacahan lengkap Sensus Ekonomi 2016, di Kabupaten Tasikmalaya, kategori industri dengan jumlah usaha sebesar 51.643 usaha yang terdiri dari usaha dengan skala Usaha Menengah Besar dan Usaha Mikro Kecil.

Industri pengolahan di Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh industri mikro kecil dengan tenaga kerja di bawah 5 orang. Adapun industri yang paling dominan adalah industri makanan dan minuman sebesar 21.734 usaha atau sebesar 42,09 persen dari total industri yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Industri lainnya yang tidak kalah banyaknya yang menjadi unggulan adalah industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 19.650 usaha atau sebesar 38,05 persen dari total jumlah industri di Kabupaten Tasikmalaya. Industri kayu, barang dari Kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya mencapai 12,23 persen dari total industri di Kabupaten Tasikmalaya atau sebesar 6.314 usaha.



Bab 5

**PERDAGANGAN SEBAGAI
KATEGORI UNGGULAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

BAB V

PERDAGANGAN SEBAGAI KATEGORI UNGGULAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Pembangunan perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan yang berwawasan nusantara. Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar.

Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi. Pembangunan perdagangan berperan penting pula dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran.

Peran sektor perdagangan yang akan bertambah penting, ditandai dengan munculnya keunggulan Ekonomi Kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, kontribusi subsektor perdagangan eceran yang semakin signifikan dalam pembentukan PDB, dan penciptaan lapangan kerja secara luas. Hal ini terjadi karena: terbentuknya integrasi domestik di sektor perdagangan; terciptanya intensitas *mutual partnership* dan *linkage* antara

perdagangan eceran dengan perdagangan besar; terciptanya transaksi domestik dan ekspor dari UKM maupun perusahaan skala besar; terciptanya intensitas koordinasi antara fasilitator Pusat (Kementerian Perdagangan) dan fasilitator Daerah (instansi terkait) dalam pengembangan perdagangan eceran, perdagangan besar, dan pembinaan sektor informal; dan tingginya tingkat penerapan manajemen dan teknologi perdagangan, termasuk yang terkait dengan jaringan.

Penggunaan metode perdagangan dan bisnis berbasis teknologi informasi semakin umum digunakan sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi, baik secara individu, kelompok atau antarkomunitas pelaku bisnis perdagangan, antara lain maraknya pemasaran melalui *internet* dan bisnis periklanan. Selain itu, keterlibatan pelaku perdagangan eceran dan perdagangan besar dalam ekspor dan impor semakin signifikan dan produktif. Implikasi kondisi di atas terhadap ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat sangat baik sekalipun pertumbuhan jumlah penduduk merambat naik. Transportasi yang terkendala oleh faktor geografis relatif teratasi karena sinergi antar wilayah. Faktor terpenting yang mendasari hasil pembangunan perdagangan adalah peningkatan indeks kepercayaan bisnis pada semua lini perdagangan di Indonesia.

Perkembangan jumlah usaha dan nilai transaksi sektor perdagangan mengalami peningkatan, yaitu nilai transaksi perdagangan eceran dan nilai transaksi perdagangan ekspor-impor. Sedangkan dalam kategori nilai transaksi perdagangan besar, terlihat proporsi nilai transaksi perdagangan nasional didominasi oleh transaksi perdagangan dalam negeri untuk distribusi dan nondistribusi serta transaksi para eksportir, yaitu berada di atas transaksi importir dan transaksi perdagangan besar yang berdasarkan *fee* atau kontrak.

Peran sistem logistik, intermediasi perdagangan, jaringan koleksi, pengumpul, pengecer, grosir, dan distribusi umumnya semakin berkembang dan meningkat, yang didorong oleh meningkatnya penggunaan teknologi elektronik, transportasi yang memadai, dan meningkatnya indeks kepercayaan bisnis di semua lini perdagangan dan perekonomian.

Sektor perdagangan memberi kontribusi positif terhadap penciptaan tenaga kerja, lingkungan hidup, kebudayaan, dan keamanan nasional serta pembentukan norma sosial bangsa.

Sementara itu, tenaga kerja di bidang perdagangan lebih didominasi pada perdagangan eceran di pertokoan, warung, eceran tradisional, eceran modern, kecuali mobil dan motor. Dengan peningkatan sinergi dan koordinasi, maka 70 persen tenaga kerja sektor perdagangan yang terisi oleh usaha informal dapat ditingkatkan statusnya. Selain itu, integrasi strategis dengan segmen komunitas ekonomi kreatif diyakini akan membuka peluang kesempatan kerja yang signifikan.

PERDAGANGAN USAHA TERBANYAK DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Kondisi geografis Kabupaten Tasikmalaya meliputi daerah bagian utara yang merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 1.000 - 2.500 meter dpl dan bagian selatan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 - 100 meter dpl. Dengan kondisi geografis tersebut, menjadikan potensi sumber daya alam yang bisa dikelola sangat beragam. Potensi produk pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Tasikmalaya antara lain pertanian yaitu tanaman pangan dan palawija, yang meliputi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, hortikultura yang meliputi cabe, durian, pisang, pepaya, duku, jambu biji, manggis, perkebunan ada teh, karet, di perikanan ada gurame, ikat laut dikembangkan lebih lanjut.

Dari hasil SE2016, diperoleh bahwa jumlah usaha di kategori Perdagangan Besar Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil Motor dan Kategori Industri Pengolahan merupakan jumlah usaha yang terbanyak di Kabupaten Tasikmalaya Untuk lebih rinci terkait jumlah usaha berdasarkan kategori dapat dilihat pada Tabel 5.1

Tabel 5.1. Jumlah Usaha Berdasarkan Kategori dan Skala Usaha di Kabupaten Tasikmalaya, 2016

Kategori	Skala Usaha		
	UMK	UMB	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
B,D,E Pertambangan penggalian; Pengadaan Listrik gas uap/air panas dan udara; Pengelolaan Air, limbah, Daur ulang sampah	1.079	20	1.099
C Industri Pengolahan	51.593	50	51.643
F Konstruksi	315	23	338
G perdagangan besar eceran, Reparasi dan perawatan mobil dan motor	83.317	264	83.581
H Pengangkutan dan pergudangan	10.045	31	10.076
I Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	21.146	3	21.149
J Informasi dan komunikasi	4.098	25	4.123
K Aktivitas keuangan dan asuransi real estat	310	161	471
L Real estat	913	8	921
M Aktivitas profesional	197	4	201
N Aktivitas penyewaan	1.620	4	1.624
P Jasa pendidikan	6.734	10	6.744
Q Aktivitas kesehatan dan sosial	1.347	3	1.350
R,S,U Kesenian, hiburan rekreasi; Aktivitas jasa lainnya	4.744	4	4.748
Jumlah	187.458	610	188.068

Sumber: Hasil SE2016 Listin, BPS Provinsi Jawa Barat

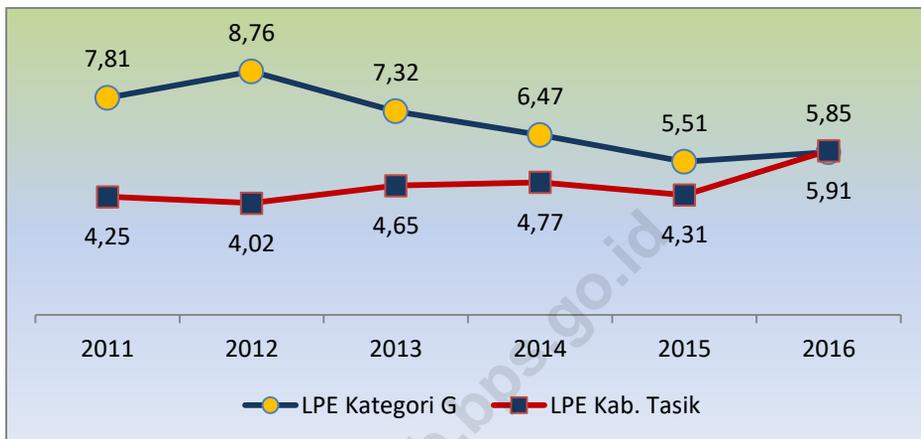
**Tabel 5.2 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori
Perdagangan 2011 - 2016**

Tahun	Kontribusi Terhadap PDRB (%)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2011	19,48	7,81
2012	20,47	8,76
2013	20,97	7,32
2014	20,74	6,47
2015	20,49	5,51
2016	20,26	5,85

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tasikmalaya, BPS Kabupaten Tasikmalaya.

Kategori Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya tidak hanya dalam hasil pendataan lengkap SE2016 yang mempunyai jumlah usaha terbesar dibanding kategori lainnya setelah pertanian. Dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tasikmalaya pun tidak jauh berbeda. Peranan Kategori Perdagangan mencapai 20,26 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 5,85 persen di tahun 2016.

Grafik 5.1 Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan Besar Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya 2011-2016



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tasikmalaya, BPS Kabupaten Tasikmalaya.

Pertumbuhan kategori perdagangan Kabupaten Tasikmalaya bila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten Tasikmalaya selalu berada diatas pertumbuhan total PDRB hanya di tahun 2016 sedikit berada di bawah pertumbuhan PDRB total Kabupaten Tasikmalaya. Ini terlihat di Grafik 5.1.

Perdagangan di Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh perdagangan eceran sebesar 75.179 usaha perdagangan eceran atau sebesar 89,95 persen dari total seluruh usaha perdagangan di Kabupaten Tasikmalaya.



Bab 6



JASA PENDIDIKAN SEBAGAI KATEGORI
UNGGULAN KABUPATEN
TASIKMALAYA

BAB VI

JASA PENDIDIKAN SEBAGAI KATEGORI UNGGULAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Dalam uraian bab sebelumnya diketahui bahwa berdasarkan analisis *base economic approach*, Kabupaten Tasikmalaya mempunyai sektor unggulan/potensial pada lima kategori lapangan usaha, yaitu kategori C (Industri Pengolahan, kategori G (Perdagangan), kategori K (Aktivitas keuangan dan Asuransi), kategori P (jasa pendidikan), dan kategori Q (jasa kesehatan dan kegiatan sosial). Jasa pendidikan merupakan sektor yang mempunyai jumlah usaha sebanyak 6.744 usaha dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 54.478 orang.

A. Potensi Jasa Pendidikan

Tabel 6.1
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016

Uraian	Sekolah	Murid	Guru
SD	1.086	244.251	11.475
MI	216	28.390	1.890
SMP	251	97.139	4.403
MTS	203	37.674	3.630
SMA	65	25.189	2.413
MA	81	13.289	1.576
SMK	133	46.921	2.707
SLB	13	522	150

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka 2017

Investasi di bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial : pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan *welfare dependency* yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah.

Walaupun sangat sulit untuk dicatat dalam dokumen statistik Todaro berkeyakinan bahwa kesempatan pendidikan dalam segala tingkatan, telah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui :

1. Terciptanya angkatan kerja yang lebih produktif karena bekal pengetahuan dan keterampilan mereka yang lebih baik.
2. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas.
3. Terciptanya suatu kelompok pimpinan yang terdidik untuk mengawasi lowongan jabatan di unit usaha, lembaga, perusahaan dan organisasi pemerintah/ swasta dan lain-lain.
4. Tersedianya berbagai program pendidikan dan pelatihan.

Di Kabupaten Tasikmalaya investasi pada kategori pendidikan dapat dilihat dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang cukup baik dan representatif pada semua tingkat pendidikan. Tabel 6.1

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan Bila APK (Angka Partisipasi Kasar) digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan

tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

APS (Angka Partisipasi Sekolah) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Tabel 6.2.
Persentase Penduduk Kelompok Umur menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
APS 5-6 / Pra Sekolah	9,85	19,91	14,07
APS 7-12 / SD	100,00	99,61	99,80
APS 13-15 / SMP	94,08	97,40	95,72
APS 16-18 / SMA	55,55	74,86	64,07

Sumber: data Susenas 2016

Tabel 6.3.
 Persentase Penduduk Kelompok Umur menurut Partisipasi Sekolah Murni
 dan Jenis Kelamin, Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SD	100,00	96,99	98,43
SMP	73,80	87,80	80,69
SMA	40,74	64,73	51,33

Sumber : data Susenas 2016

POTENSI KATEGORI PENDIDIKAN

Seiring dengan berkembangnya perekonomian Kabupaten Tasikmalaya struktur perekonomian Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011– 2016 kategori pendidikan mengalami pertumbuhan yang selalu berada di atas pertumbuhan PDRB Kabupaten Tasikmalaya.

Urusan wajib dalam kaitan ini adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara, antara lain perlindungan hak konstitusional; perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia; pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

Sedangkan urusan pilihan dalam kaitan ini adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah di tingkat kabupaten kota adalah Pendidikan. Kabupaten Tasikmalaya menjadikan pendidikan menjadi urusan wajib yang pertama dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.

Berikut ini urusan wajib pendidikan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya :

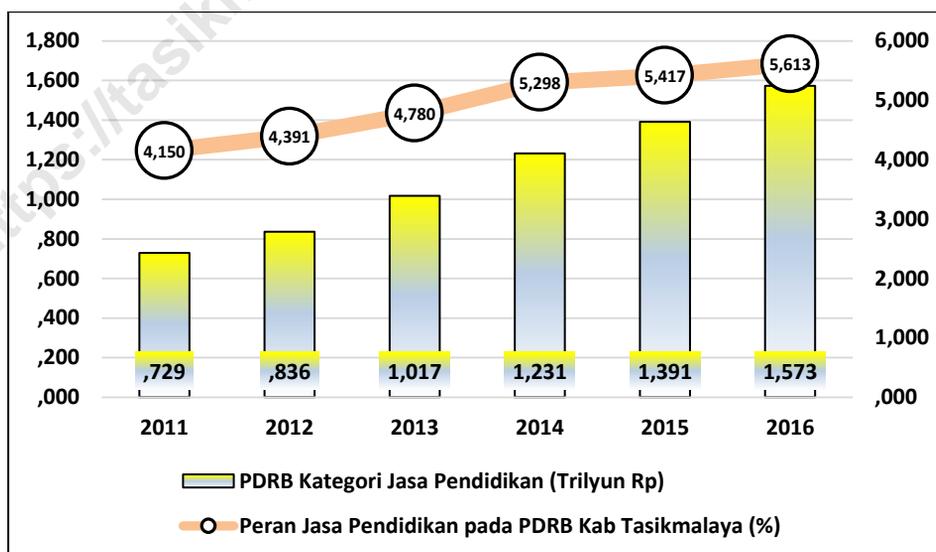
1. Tuntasnya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan terlaksananya rintisan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun
2. Meningkatnya mutu manajemen tata kelola pendidikan
3. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan bagi anak usia dini dan pendidikan luar sekolah yang merata, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat
4. Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
5. Menurunnya angka putus sekolah terutama peserta didik kurang mampu
6. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan inklusif
7. Meningkatnya kreativitas siswa di semua jenjang pendidikan
8. Meningkatnya kemampuan dan budaya baca masyarakat

Tabel 6.4 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya 2011 – 2016

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB Kategori Jasa Pendidikan (Trilyun Rp)	0,73	0,84	1,02	1,23	1,39	1,57
Produk Domestik Regional Bruto (Trilyun Rp)	17,56	19,03	21,27	23,24	25,68	28,02
Peran Jasa Pendidikan pada PDRB Kab Tasikmalaya (%)	4,15	4,39	4,78	5,30	5,42	5,61
LPE Jasa Pendidikan (%)	9,78	13,47	12,25	18,58	11,51	10,79
LPE PDRB Kab Tasikmalaya (%)	4,25	4,02	4,65	4,77	4,31	5,91

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tasikmalaya, BPS Kabupaten Tasikmalaya

Grafik. 6.1.
PDRB Kategori P Nilai dan Perannya Terhadap PDRB Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 – 2016



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tasikmalaya, BPS Kabupaten Tasikmalaya

Tabel 6.5. Proporsi Usaha dan Tenaga Kerja Kategori Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya dan Propinsi Jawa Barat

Uraian	Tasikmalaya	Jawa Barat	Peran (2) / (3)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Usaha Pada Kategori Pendidikan	6.744	94.720	7,12
Jumlah Usaha Hasil Listing SE 2016	188.068	4.634.807	4,06
Proporsi Jumlah Usaha Pendidikan dibandingkan Jumlah Usaha Hasil SE 2016	3,59	2,04	
Jumlah Tenaga Kerja Pada Kategori Pendidikan	54.478	953.085	5,72
Jumlah Tenaga Kerja Hasil Listing SE 2016	349.103	11.370.733	3,07
Proporsi Jumlah Tenaga Kerja Pendidikan dibandingkan Jumlah Usaha Hasil SE 2016	15,61	8,38	

Sumber: Hasil SE2016 Listing, BPS Provinsi Jawa Barat.

Proporsi jumlah usaha kategori pendidikan hasil listing SE 2016 di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebanyak 6.744 usaha dari 188.068 usaha yang ada di Kabupaten Tasikmalaya atau 3,59 persen angka ini lebih tinggi dari pada angka Jawa Barat yang sebesar 2,04 persen.

Apabila menggunakan kategori yang sama yaitu kategori pendidikan di Kab Tasikmalaya proporsi jumlah usahanya adalah sebesar 7,12 persen dari

total usaha kategori pendidikan yang terdaftar pada SE Listing 2016 di Propinsi Jawa Barat.

Proporsi jumlah tenaga kerja kategori pendidikan hasil listing SE 2016 di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebanyak 54.478 orang dari 349.103 orang tenaga kerja pada seluruh usaha yang terdaftar dalam SE Listing 2016 di Kabupaten Tasikmalaya atau 15,61 persen angka ini lebih tinggi dari pada angka Jawa Barat yang sebesar 8,38 persen.

Apabila menggunakan kategori yang sama yaitu kategori pendidikan di Kab Tasikmalaya maka proporsi jumlah tenaga kerja kategori pendidikan adalah sebesar 5,72 persen dari total tenaga kerja kategori pendidikan yang terdaftar pada SE Listing 2016 di Propinsi Jawa Barat.

Persentase tenaga kerja sebesar 15,61 % dari total tenaga kerja hasil pendataan SE 2016 Listing di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan peran kategori pendidikan yang sangat besar bagi penyerapan tenaga kerja.

Bab 7

Intisari

<https://basikmalayakab.bps.go.id>

Bab 7

Intisari

Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016) dilaksanakan untuk mendapatkan potret utuh perekonomian bangsa nonpertanian. Gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi nonpertanian, berikut informasi dasar dan karakteristiknya dapat tergambarkan pada tingkat nasional maupun regional. Hasil Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) dapat menjadi langkah awal untuk menakar kekuatan perekonomian Kabupaten Tasikmalaya di luar sektor pertanian secara lengkap.

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016 (SE2016), jumlah usaha/perusahaan Kabupaten Tasikmalaya sebesar 188.068 usaha. Usaha tersebut 99,68 persen diantaranya termasuk usaha mikro kecil (UMK). Secara keseluruhan usaha/perusahaan tersebut dapat menyerap 349.103 tenaga kerja. Sejalan dengan jumlah usaha yang didominasi oleh UMK, penyerapan tenaga kerja juga lebih banyak di usaha/perusahaan yang termasuk UMK. Sekitar 97,52 persen dari total tenaga kerja yang terserap di Kabupaten Tasikmalaya berada pada UMK.

Tantangan dalam perekonomian di setiap wilayah di negara tercinta ini secara umum hampir sama, tidak terkecuali Kabupaten Tasikmalaya. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang merupakan modal utama dalam perekonomian adalah salah satu tantangan yang cukup besar bagi setiap wilayah untuk dapat meningkatkan perekonomian. Selain itu, kesenjangan antar wilayah seperti ketidakmerataan infrastruktur juga merupakan permasalahan yang harus diselesaikan pemerintah daerah setempat dan juga pemerintah pusat.

Dalam upaya peningkatan perekonomian suatu wilayah diperlukan perencanaan yang optimal dan efisien. Oleh karena diperlukan identifikasi potensi ekonomi regional salah satu caranya dengan mengidentifikasi sektor unggulan. Berdasarkan analisis *base economic approach*, Kabupaten Tasikmalaya mempunyai sektor unggulan/potensial pada lima kategori lapangan usaha, yaitu kategori C (Industri Pengolahan, kategori G (Perdagangan), kategori K (Aktivitas keuangan dan Asuransi), kategori P (jasa pendidikan), dan kategori Q (jasa kesehatan dan kegiatan sosial). Jasa pendidikan merupakan sektor yang mempunyai jumlah usaha sebanyak 6.744 usaha dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 54.478 orang.

Dengan demikian diharapkan pengembangan perekonomian dapat dilakukan secara optimal pada sektor-sektor unggulan dan wilayah-wilayah potensial. Selain itu, hasil SE2016 dan kinerja ekonomi yang dilihat berdasarkan PDRB perlu dianalisis capaiannya di setiap wilayah. Kemudian hasilnya perlu dikaitkan dengan program pemerintah, sehingga hasilnya akan menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan sektoral dan regional.

Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor adalah lapangan usaha favorit penduduk Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah usaha dan tenaga kerja terbanyak, diikuti Industri Pengolahan. Untuk Jumlah usaha yang banyak ke tiga adalah kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum. Namun jumlah tenaga kerja pada kategori ini dibawah kategori pendidikan. Kategori pendidikan jumlah usaha terdapat pada urutan ke lima, namun dalam hal jumlah tenaga kerja menduduki urutan ke tiga.



DP



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Pertama*. Yogyakarta : BPFE

Asean Automotive Federation. 2016. *Asean Automotive Federation 2016 Statistics*. Diakses dari www.asean-autofed.com

Badan Pusat Statistik, 2015. *Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015*. Jakarta : Badan Pusat Statistik

_____, 2016. *Laporan Perekonomian Indonesia 2016*. Jakarta : Badan Pusat Statistik

_____, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Pulau Jawa 2012-2016*. Jakarta : Badan Pusat Statistik

_____, 2017. *Sensus Ekonomi 2016 Analisis Hasil Listing : Potensi Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Badan Pusat Statistik

_____, 2017. *Indeks Pembangunan Manusia 2016*. Jakarta : Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2012. *Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2012*. Bandung : BPS Provinsi Jawa Barat

_____, 2013. *Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2013*. Bandung : BPS Provinsi Jawa Barat

_____, 2014. *Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2014*. Bandung : BPS Provinsi Jawa Barat

- _____, 2015. *Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2015*. Bandung : BPS Provinsi Jawa Barat
- _____, 2016. *Hasil Sensus Ekonomi 2016 Listing Provinsi Jawa Barat*. Bandung : BPS Provinsi Jawa Barat
- _____, 2016. *Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2016*. Bandung : BPS Provinsi Jawa Barat
- _____, 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Barat 2012 – 2016*. Bandung : BPS Provinsi Jawa Barat
- _____, 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat 2012 – 2016*. Bandung : BPS Provinsi Jawa Barat
- _____, 2016. *Data Hasil Survei VHT-L 2015*. Bandung : BPS Provinsi Jawa Barat
- _____, 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tasikmalaya 2012 – 2016*. Tasikmalaya : BPS Kabupaten Tasikmalaya
- _____, 2017. *Jawa Barat Dalam Angka 2017*. Bandung : BPS Provinsi Jawa Barat
- _____, 2017. *Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2017*. Bandung : BPS Provinsi Jawa Barat
- _____. 2017. *Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Jawa Barat 2016*. Bandung : BPS Provinsi Jawa Barat
- _____, 2017. *Data Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016 Provinsi Jawa Barat*. Bandung : BPS Provinsi Jawa Barat
- _____, 2017. *Data Statistik Pariwisata Provinsi Jawa Barat*. Bandung : BPS Provinsi Jawa Barat

Bappenas, 2009. *Kajian Evaluasi Pembangunan Sektoral : Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan*. Jakarta : Bappenas

_____, 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 Buku I Agenda Pembangunan Nasional*. Jakarta : Bappenas

_____, 2016. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah 2017*. Jakarta : Bappenas

_____, 2017. *Kebijakan Penyusunan Anggaran Untuk Mendukung Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Dalam RKP 2017*. Jakarta : Bappenas

Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2010. *Peraturan Daerah Jawa Barat Nomo 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029*. Bandung : Bappeda Provinsi Jawa Barat

_____, 2013. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Barat 2013 – 2018*. Bandung : Bappeda Provinsi Jawa Barat

_____, 2016. *Discussion Report Tim Ekonomi Regional Provinsi Jawa Barat*. Bandung : Bappeda Provinsi Jawa Barat

_____, 2017. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2018*. Bandung : Bappeda

Bank Indonesia. 2017. *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Barat Edisi Februari 2017*. Bandung : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat

_____. 2017. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Jawa Barat Februari 2017*. Bandung : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat

Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2017. *Statistik Investasi Wajib LKPM*. Diakses dari dpmpptsp.jabarprov.go.id

<https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/industri-sektor/pariwisata/item6051?> diakses tanggal 17 Desember 2017

INDEF, 2016. *Proyeksi Ekonomi Indonesia 2017 : Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia*. Jakarta : INDEF

Jhingan, ML. 2002. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Randang B, Frankiano, 2011. *Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga Kerja Asing dalam SERVANDA Jurnal Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1 Januari 2011*.

Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid 1*. Jakarta : Erlangga

Setia M.S., Resmi. 2005. *Gali Tutup Lubang Itu Biasa : Strategi Buruh Menanggulangi Persoalan dari Waktu ke Waktu*. Bandung : Yayasan Akatiga, diakses dari <https://books.google.co.id/books>

_____, 2013. *Sejarah Buruh Tenun Majalaya. Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa*. Editor : Erwiza Erman dan Ratna Saptari. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Diakses dari <https://books.google.co.id/books>

UNDP. 1996. *Laporan Pembangunan Manusia 1996*. New York : UNDP



CT



CATATAN TEKNIS

CATATAN TEKNIS

Untuk mendapatkan sektor/kategori unggulan di suatu wilayah, beberapa metode pengukuran yang umum digunakan antara lain *Location Quotient* (LQ), Analisis *Shift-Share*, Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan Tipologi Klassen.

1. *Location Quotient* (LQ)

Analisis LQ digunakan untuk menunjukkan besarnya peranan sektor perekonomian suatu wilayah dengan membandingkan sektor yang sama pada wilayah yang lebih besar. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi potensial yang menjadi unggulan dan dapat dikembangkan di suatu wilayah. Disamping itu juga digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif (*comparative advantage*) suatu wilayah.

Rumus untuk mendapatkan sektor unggulan di suatu wilayah analisis adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{S_{ij}/S_j}{S_{in}/S_n}$$

Keterangan:

S_{ij} : PDRB pada sektor i pada wilayah analisis j

S_j : PDRB pada wilayah analisis j

S_{in} : PDB pada sektor i di wilayah referensi

S_n : PDB di wilayah referensi

Jika berpijak pada data SE2016-L yang menghasilkan indikator jumlah usaha dan jumlah tenaga kerja, maka PDRB pada rumus di atas dapat menggunakan jumlah usaha dan jumlah tenaga kerja. Pengukuran LQ menghasilkan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $LQ > 1$, sektor i di wilayah analisis j merupakan sektor unggulan, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi pada wilayah analisis tersebut daripada tingkat wilayah yang lebih luas lagi (wilayah referensi)
- b. Jika $LQ = 1$, sektor i di wilayah analisis j bukan merupakan sektor unggulan, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya sama dengan wilayah referensi.
- c. Jika $LQ < 1$, sektor i di wilayah analisis j bukan merupakan sektor unggulan, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah daripada wilayah referensi.

2. Analisis *Shift-Share*

Analisis *shift share* merupakan salah satu teknik untuk menganalisis data statistik regional, seperti PDRB, tenaga kerja dan lain-lain untuk mengamati struktur perekonomian daerah dan perubahannya secara deskriptif. Caranya dengan menitikberatkan pada pertumbuhan sektor di suatu wilayah dan memproyeksikan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut dengan data yang terbatas (Firdaus, 2007). Analisis ini merupakan salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu wilayah terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih luas sebagai referensi.

Dalam metode ini terdapat 3 bagian yaitu:

- a. **Regional Share (RS)** merupakan komponen share pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor eksternal. RS mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijakan nasional yang berlaku.
- b. **Proporsional Shift (PS)** komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah tersebut yang baik, dengan berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat.
- c. **Differential Shift (DS)** merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang kompetitif. Unsur pertumbuhan ini merupakan keunggulan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah
- d. **Shift Share(SS)** merupakan penjumlahan dari *Regional Share* dengan *Proportional Share* dan *Differential Share*

Jika ingin melihat keunggulan wilayah di suatu wilayah, maka keempat unsur tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$RS_{ij} = y_{ij0} \left(\frac{Y_t}{Y_0} - 1 \right)$$

$$PS_{ij} = y_{ij0} \left(\frac{y_{it}}{y_{i0}} - \frac{Y_t}{Y_0} \right)$$

$$DS_{ij} = y_{ij0} \left(\frac{y_{ijt}}{y_{ij0}} - \frac{y_{it}}{y_{i0}} \right)$$

$$SS_{ij} = RS_{ij} + PS_{ij} + DS_{ij}$$

Keterangan:

Y_t = PDB wilayah referensi periode akhir tahun.

Y_o = PDB wilayah referensi periode awal tahun.

y_{it} = PDB wilayah referensi sektor ke-i periode tahun akhir.

y_{io} = PDB wilayah referensi sektor ke-i periode tahun awal.

y_{ijt} = PDRB wilayah analisis sektor ke-i periode tahun akhir.

y_{ijo} = PDRB wilayah analisis sektor ke-i periode tahun awal.

Interpretasi dari hasil pengukuran diatas sebagai berikut:

- Jika $PS_{ij} > 0$, artinya bahwa sektor i pada suatu wilayah analisis tumbuh lebih cepat daripada sektor i di wilayah referensi, dan sebaliknya.
- Jika $DS_{ij} > 0$, artinya bahwa daya saing sektor i pada suatu wilayah analisis lebih tinggi dari daya saing sektor i di wilayah referensi, dan sebaliknya.
- Jika $SS_{ij} > 0$, artinya terjadi penambahan nilai absolut atau mengalami kenaikan kinerja ekonomi daerah pada sektor i di wilayah analisis tersebut.

Dari ukuran diatas, maka sektor unggulan wilayah adalah sektor-sektor yang mempunyai daya saing yang tinggi. Daya saing suatu sektor menunjukkan potensi yang tinggi untuk dikembangkan.

3. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Metode MRP melakukan identifikasi sektor-sektor ekonomi potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB (*competitive advantage*). MRP membandingkan pertumbuhan suatu sektor pada suatu wilayah terhadap wilayah yang lebih besar, baik dalam skala besar maupun kecil. Pada analisis ini terdapat dua rasio pertumbuhan yang bisa dihitung yaitu: rasio

pertumbuhan wilayah study (RPs), dan rasio wilayah referensi (RPr). Jika ingin melihat sektor unggulan suatu pulau, rumusnya adalah sebagai berikut:

$$RP_{ip} = \frac{(y_{ipt} - y_{ip0})/y_{ipt}}{(y_{pt} - y_{p0})/y_{p0}}$$

$$RP_{in} = \frac{(y_{int} - y_{ino})/y_{int}}{(y_{nt} - y_{n0})/y_{n0}}$$

Keterangan:

y_{ipt} = PDRB sektor i wilayah analisis ke p pada periode tahun akhir.

y_{ip0} = PDRB sektor i wilayah analisis ke p pada periode tahun awal.

y_{pt} = PDRB total wilayah analisis p pada periode tahun akhir.

y_{p0} = PDRB total wilayah analisis p pada periode tahun awal.

y_{int} = PDB sektor i wilayah referensi pada periode tahun akhir.

y_{ino} = PDR sektor i wilayah referensi pada periode tahun awal.

y_{nt} = PDB wilayah referensi pada periode tahun akhir.

y_{n0} = PDB wilayah referensi pada periode tahun awal.

MRP hanya memperhitungkan pertumbuhan sektor, tanpa melihat kontribusi suatu sektor di dalam suatu wilayah. Berikut interpretasi hasilnya:

- Jika nilai RP_{ip} positif dan RP_{in} positif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama tinggi → sektor tersebut merupakan potensi baik di tingkat regional maupun global (di level wilayah referensinya)
- Jika nilai RP_{ip} positif dan RP_{in} negatif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih tinggi dari wilayah referensi → sektor tersebut merupakan potensi di tingkat regional namun secara global tidak berpotensi

- Jika nilai RP_{ip} negatif dan RP_{in} positif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih rendah dari wilayah referensi → sektor tersebut merupakan potensi di tingkat global namun secara regional tidak berpotensi
- Jika nilai RP_{ip} negatif dan RP_{in} negatif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama rendah → sektor tersebut tidak berpotensi baik di tingkat regional maupun global (wilayah referensi)

4. Tipologi Klassen

Tipologi Klassen mendasarkan pengelompokan suatu sektor di suatu wilayah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dengan pertumbuhan ekonomi wilayah yang lebih luas dan membandingkan pangsa sektor tersebut dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih luas. Hasil analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor tersebut dalam membentuk perekonomian di suatu wilayah.

Untuk melihat potensi ekonomi di suatu wilayah digunakan pendekatan pertumbuhan sektoral dan kontribusinya terhadap perekonomian di suatu wilayah. Melalui metode ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan dari sektor ekonomi yang berbeda, yaitu: sektor unggulan dan tumbuh pesat, sektor unggulan tapi pertumbuhannya tertekan, sektor potensial yang berkembang cepat, dan sektor yang tidak potensial. Adapun matriks untuk menentukan tipe karakteristik untuk melihat sektor unggulan di tingkat wilayah analisis adalah sebagai berikut:

Kontribusi Sektoral	Pertumbuhan Sektoral	
	$G_i \geq G$	$G_i < G$
$S_i \geq S$	Sektor unggulan dan tumbuh pesat	Sektor unggulan tetapi pertumbuhannya tertekan
$S_i < S$	Sektor potensial dan masih dapat dikembangkan	Bukan sektor potensial dan tertinggal

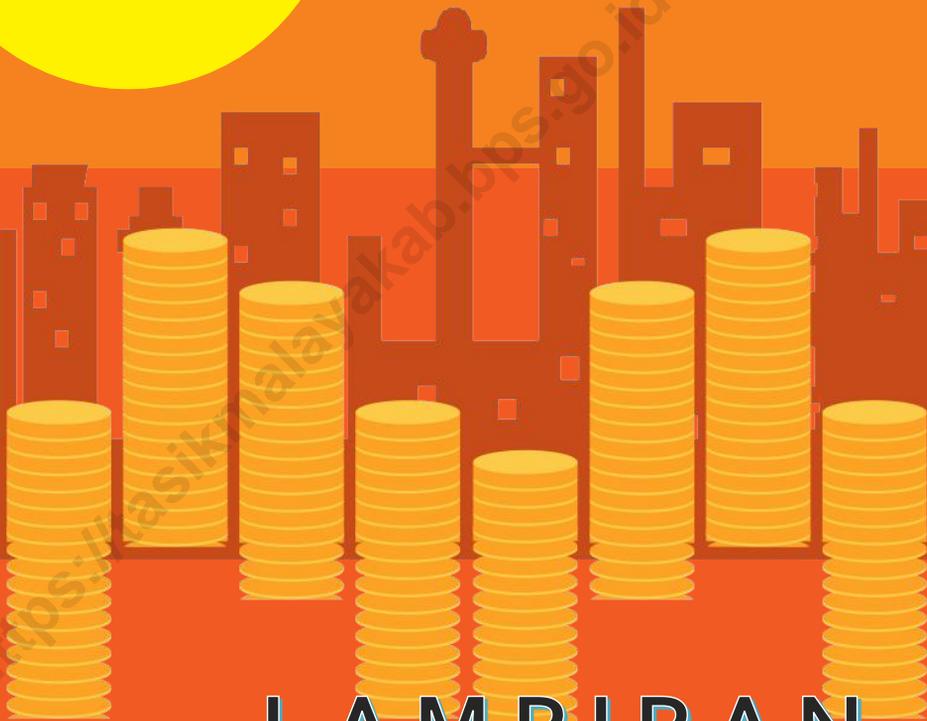
Keterangan:

G_i : Pertumbuhan PDRB sektor i di wilayah analisis

G : Pertumbuhan PDB/PDRB sektor i di wilayah referensi

S_i : Kontribusi PDRB sektor i di wilayah analisis

S : Kontribusi PDB/PDRB sektor i di wilayah referensi



LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1
Jumlah dan Distribusi Usaha/Perusahaan Menurut Kategori Lapangan Usaha
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016

Lapangan Usaha (1)	Jumlah Usaha/ Perusahaan (2)	Distribusi (%) (3)
B. Pertambangan dan penggalan	662	0,35
C. Industri Pengolahan	51.643	27,46
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	87	0,05
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	350	0,19
F. Konstruksi	338	0,18
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	83.581	44,44
H. Pengangkutan dan pergudangan	10.076	5,36
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	21.149	11,25
J. Informasi Dan Komunikasi	4.123	2,19
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	471	0,25
L. Real Estat	921	0,49
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	201	0,11
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	1.624	0,86
P. Pendidikan	6.744	3,59
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	1.350	0,72
R. Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	803	0,43
S. Aktivitas Jasa Lainnya	3.945	2,10
U. Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-
Jumlah	188.068	100,00

Sumber : Hasil SE2016 Listing, BPS Provinsi Jawa Barat

Lampiran 2
Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha
Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016

Lapangan Usaha	Skala Usaha		Total Usaha/ Perusahaan
	Usaha Mikro Kecil	Usaha Menengah Besar	
(1)	(2)	(3)	(4)
B. Pertambangan dan penggalian	656	6	662
C. Industri Pengolahan	51.593	50	51.643
D. Pengadaan Listrik. Gas. Uap/Air Panas dan Udara Dingin	78	9	87
E. Pengelolaan Air. Pengelolaan Air Limbah. Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah. dan Aktivitas Remediasi	345	5	350
F. Konstruksi	315	23	338
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	83.317	264	83.581
H. Pengangkutan dan pergudangan	10.045	31	10.076
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	21.146	3	21.149
J. Informasi Dan Komunikasi	4.098	25	4.123
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	310	161	471
L. Real Estat	913	8	921
M. Aktivitas Profesional. Ilmiah Dan Teknis	197	4	201
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi. Ketenagakerjaan. Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	1.620	4	1.624
P. Pendidikan	6.734	10	6.744
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	1.347	3	1.350
R. Kesenian. Hiburan Dan Rekreasi	803	0	803
S. Aktivitas Jasa Lainnya	3.941	4	3.945
U. Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-
Jumlah	187.458	610	188.068

Sumber : Hasil SE2016 Listing. BPS Provinsi Jawa Barat

Lampiran 3
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha
Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016

Lapangan Usaha (1)	Jumlah Usaha/ Perusahaan	Persentase (%)
B. Pertambangan dan penggalian	1.072	0,31
C. Industri Pengolahan	96.327	27,59
D. Pengadaan Listrik. Gas. Uap/Air Panas dan Udara Dingin	328	0,09
E. Pengelolaan Air. Pengelolaan Air Limbah. Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah. dan Aktivitas Remediasi	703	0,20
F. Konstruksi	3.435	0,98
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	127.271	36,46
H. Pengangkutan dan pergudangan	11.285	3,23
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	27.733	7,94
J. Informasi Dan Komunikasi	4.913	1,41
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	4.462	1,28
L. Real Estat	1.153	0,33
M. Aktivitas Profesional. Ilmiah Dan Teknis	404	0,12
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi. Ketenagakerjaan. Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	3.208	0,92
P. Pendidikan	54.478	15,61
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	4.728	1,35
R. Kesenian. Hiburan Dan Rekreasi	1.821	0,52
S. Aktivitas Jasa Lainnya	5.782	1,66
U. Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-
Jumlah	349.103	100,00

Sumber : Hasil SE2016 Listing. BPS Provinsi Jawa Barat

Lampiran 4
Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Skala Usaha dan
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Skala Usaha		Total Usaha/Perusahaan
	Usaha Mikro Kecil	Usaha Menengah Besar	
(1)	(2)	(3)	(4)
[01] Bogor	368.740	6.308	375.048
[02] Sukabumi	266.945	2.057	269.002
[03] Cianjur	249.221	1.587	250.808
[04] Bandung	348.858	4.419	353.277
[05] Garut	257.858	1.283	259.141
[06] Tasikmalaya	187.458	610	188.068
[07] Ciamis	138.877	842	139.719
[08] Kuningan	94.090	795	94.885
[09] Cirebon	250.162	2.442	252.604
[10] Majalengka	155.419	1.422	156.841
[11] Sumedang	115.039	1.164	116.203
[12] Indramayu	189.325	1.721	191.046
[13] Subang	168.486	1.292	169.778
[14] Purwakarta	85.745	1.501	87.246
[15] Karawang	230.654	2.952	233.606
[16] Bekasi	225.844	5.198	231.042
[17] Bandung Barat	155.041	1.246	156.287
[18] Pangandaran	59.990	303	60.293
[71] Kota Bogor	83.515	2.891	86.406
[72] Kota Sukabumi	39.059	923	39.982
[73] Kota Bandung	333.112	10.826	343.938
[74] Kota Cirebon	38.799	1.425	40.224
[75] Kota Bekasi	193.619	9.437	203.056
[76] Kota Depok	158.210	4.178	162.388
[77] Kota Cimahi	55.851	1.059	56.910
[78] Kota Tasikmalaya	89.488	1.625	91.113
[79] Kota Banjar	25.553	343	25.896
[32] Jawa Barat	4.564.958	69.849	4.634.807

Sumber : Hasil SE2016 Listing. BPS Provinsi Jawa Barat

Lampiran 5
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha
dan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Skala Usaha		Total Tenaga Kerja
	Usaha Mikro Kecil	Usaha Menengah Besar	
(1)	(2)	(3)	(4)
[01] Bogor	704.197	326.511	1.030.708
[02] Sukabumi	467.117	119.993	587.110
[03] Cianjur	431.864	41.596	473.460
[04] Bandung	681.549	227.779	909.328
[05] Garut	469.035	42.638	511.673
[06] Tasikmalaya	340.461	8.642	349.103
[07] Ciamis	249.642	16.671	266.313
[08] Kuningan	173.923	17.029	190.952
[09] Cirebon	434.991	60.096	495.087
[10] Majalengka	268.471	37.312	305.783
[11] Sumedang	211.022	83.605	294.627
[12] Indramayu	333.283	28.969	362.252
[13] Subang	294.658	60.288	354.946
[14] Purwakarta	162.964	104.202	267.166
[15] Karawang	401.473	190.558	592.031
[16] Bekasi	428.025	517.492	945.517
[17] Bandung Barat	277.183	69.296	346.479
[18] Pangandaran	114.968	5.278	120.246
[71] Kota Bogor	177.941	70.982	248.923
[72] Kota Sukabumi	75.242	21.995	97.237
[73] Kota Bandung	672.334	347.280	1.019.614
[74] Kota Cirebon	82.992	37.547	120.539
[75] Kota Bekasi	392.033	206.896	598.929
[76] Kota Depok	306.719	102.900	409.619
[77] Kota Cimahi	104.606	87.352	191.958
[78] Kota Tasikmalaya	181.259	38.876	220.135
[79] Kota Banjar	48.420	12.578	60.998
[32] Jawa Barat	8.486.372	2.884.361	11.370.733

Sumber : Hasil SE2016 Listing. BPS Provinsi Jawa Barat

Lampiran 6
Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Kategori
dan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Kategori					
	B. D. E	C	F	G	H	I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
[01] Bogor	3.533	38.039	1.173	184.100	2.355	70.779
[02] Sukabumi	2.045	35.213	1.235	138.142	27.605	34.719
[03] Cianjur	1.578	37.604	902	126.807	23.381	35.737
[04] Bandung	4.234	55.210	2.166	156.763	25.946	63.317
[05] Garut	1.608	47.858	825	124.690	22.468	34.197
[06] Tasikmalaya	1.099	51.643	338	83.581	10.076	21.149
[07] Ciamis	580	32.233	322	65.567	9.009	16.343
[08] Kuningan	809	11.350	276	49.342	5.230	15.879
[09] Cirebon	2.876	26.474	2.914	122.354	15.891	51.870
[10] Majalengka	2.141	33.404	587	67.838	9.554	25.928
[11] Sumedang	704	21.492	473	50.449	9.287	21.272
[12] Indramayu	2.117	16.028	815	92.833	14.225	43.578
[13] Subang	1.091	15.020	679	86.133	9.261	37.604
[14] Purwakarta	741	8.215	417	44.720	5.431	16.125
[15] Karawang	1.370	16.786	872	130.317	8.119	50.400
[16] Bekasi	2.082	17.761	1.168	120.679	10.328	48.519
[17] Bandung Barat	1.020	20.104	608	81.475	11.957	23.731
[18] Pangandaran	231	21.532	132	25.403	1.684	6.246
[71] Kota Bogor	554	7.098	328	37.857	4.618	20.436
[72] Kota Sukabumi	263	3.997	183	17.529	3.591	7.438
[73] Kota Bandung	2.621	32.512	1.918	143.416	21.967	91.793
[74] Kota Cirebon	387	3.023	222	16.985	2.327	11.233
[75] Kota Bekasi	2.547	13.042	1.583	89.621	11.116	47.187
[76] Kota Depok	1.200	12.871	806	65.195	9.104	36.055
[77] Kota Cimahi	509	6.328	207	23.187	2.252	13.921
[78] Kota Tasikmalaya	916	22.669	224	34.678	4.339	16.617
[79] Kota Banjar	194	4.230	86	11.742	1.343	4.748
[32] Jawa Barat	39.050	611.736	21.459	2.191.403	302.464	866.821

Sumber : Hasil SE2016 Listing. BPS Provinsi Jawa Barat

Lampiran 6
(Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Kategori						Jumlah
	K	L	M.N	P	Q	R.S.U	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
[01] Bogor	934	14.275	4.469	8.693	2.807	13.388	375.048
[02] Sukabumi	656	2.576	2.975	7.265	2.009	6.718	269.002
[03] Cianjur	535	2.478	2.169	3.903	1.414	7.126	250.808
[04] Bandung	1.058	6.499	4.684	6.257	1.977	13.945	353.277
[05] Garut	716	2.164	2.367	5.367	1.765	7.391	259.141
[06] Tasikmalaya	471	921	1.825	6.744	1.350	4.748	188.068
[07] Ciamis	594	588	1.856	3.965	1.078	4.489	139.719
[08] Kuningan	446	493	1.539	2.563	924	3.350	94.885
[09] Cirebon	736	622	2.444	4.728	1.167	16.536	252.604
[10] Majalengka	649	880	1.907	2.826	1.116	5.572	156.841
[11] Sumedang	515	678	1.208	2.454	790	3.845	116.203
[12] Indramayu	665	816	2.305	3.214	1.385	8.957	191.046
[13] Subang	700	1.471	1.758	3.150	1.252	6.646	169.778
[14] Purwakarta	358	1.524	1.090	1.690	818	3.480	87.246
[15] Karawang	809	3.362	2.076	4.575	1.474	8.733	233.606
[16] Bekasi	572	6.459	2.761	3.637	2.053	9.281	231.042
[17] Bandung Barat	405	2.703	1.829	2.740	897	4.458	156.287
[18] Pangandaran	147	340	961	1.061	342	1.614	60.293
[71] Kota Bogor	567	4.082	1.460	1.646	741	4.063	86.406
[72] Kota Sukabumi	302	1.740	492	998	322	1.793	39.982
[73] Kota Bandung	2.345	6.785	6.142	5.243	2.051	17.851	343.938
[74] Kota Cirebon	455	470	642	876	299	2.337	40.224
[75] Kota Bekasi	981	11.082	3.605	3.447	1.883	11.109	203.056
[76] Kota Depok	836	13.675	2.945	4.093	1.581	8.792	162.388
[77] Kota Cimahi	332	2.988	988	1.005	423	2.718	56.910
[78] Kota Tasikmalaya	521	1.932	1.140	1.922	690	3.426	91.113
[79] Kota Banjar	165	321	322	658	159	1.004	25.896
[32] Jawa Barat	17.470	91.924	57.959	94.720	32.767	183.370	4.634.807

Sumber : Hasil SE2016 Listing. BPS Provinsi Jawa Barat

Lampiran 7
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kategori
dan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Kategori					
	B. D. E	C	F	G	H	I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
[01] Bogor	11.175	322.757	17.554	333.801	32.829	114.934
[02] Sukabumi	5.700	165.629	12.170	222.766	30.040	46.184
[03] Cianjur	4.495	88.354	10.553	212.371	25.224	51.410
[04] Bandung	9.194	328.786	22.427	270.904	29.773	91.736
[05] Garut	4.009	121.555	9.817	192.609	25.354	47.827
[06] Tasikmalaya	2.103	96.327	3.435	127.271	11.285	27.733
[07] Ciamis	978	69.493	4.151	100.337	11.889	22.105
[08] Kuningan	1.967	26.826	4.251	80.395	6.662	23.260
[09] Cirebon	5.053	91.204	26.695	192.670	19.298	68.339
[10] Majalengka	4.014	86.681	7.677	105.847	10.901	34.028
[11] Sumedang	2.434	105.555	7.715	81.103	11.192	30.610
[12] Indramayu	5.699	44.209	10.721	145.152	15.648	60.972
[13] Subang	2.637	73.849	8.399	135.844	10.071	52.477
[14] Purwakarta	3.827	100.282	7.610	79.058	7.356	26.403
[15] Karawang	4.222	183.665	10.555	214.464	12.662	74.895
[16] Bekasi	7.887	444.260	20.115	239.644	31.285	78.894
[17] Bandung Barat	3.221	90.847	6.444	131.581	13.770	35.401
[18] Pangandaran	474	43.614	1.891	43.018	2.513	11.191
[71] Kota Bogor	1.983	32.284	5.506	83.689	9.498	40.882
[72] Kota Sukabumi	1.450	11.416	2.761	33.953	4.672	12.586
[73] Kota Bandung	9.853	187.948	30.288	310.072	46.329	171.804
[74] Kota Cirebon	1.260	12.031	3.655	40.767	5.580	21.110
[75] Kota Bekasi	7.891	105.983	27.641	196.947	26.935	85.246
[76] Kota Depok	3.451	61.752	8.953	130.139	12.847	63.694
[77] Kota Cimahi	1.268	83.692	2.822	41.412	3.913	21.001
[78] Kota Tasikmalaya	2.091	66.622	3.643	64.433	8.326	26.071
[79] Kota Banjar	748	14.564	1.557	20.577	1.822	6.570
[32] Jawa Barat	109.084	3.060.185	279.006	3.830.824	427.674	1.347.363

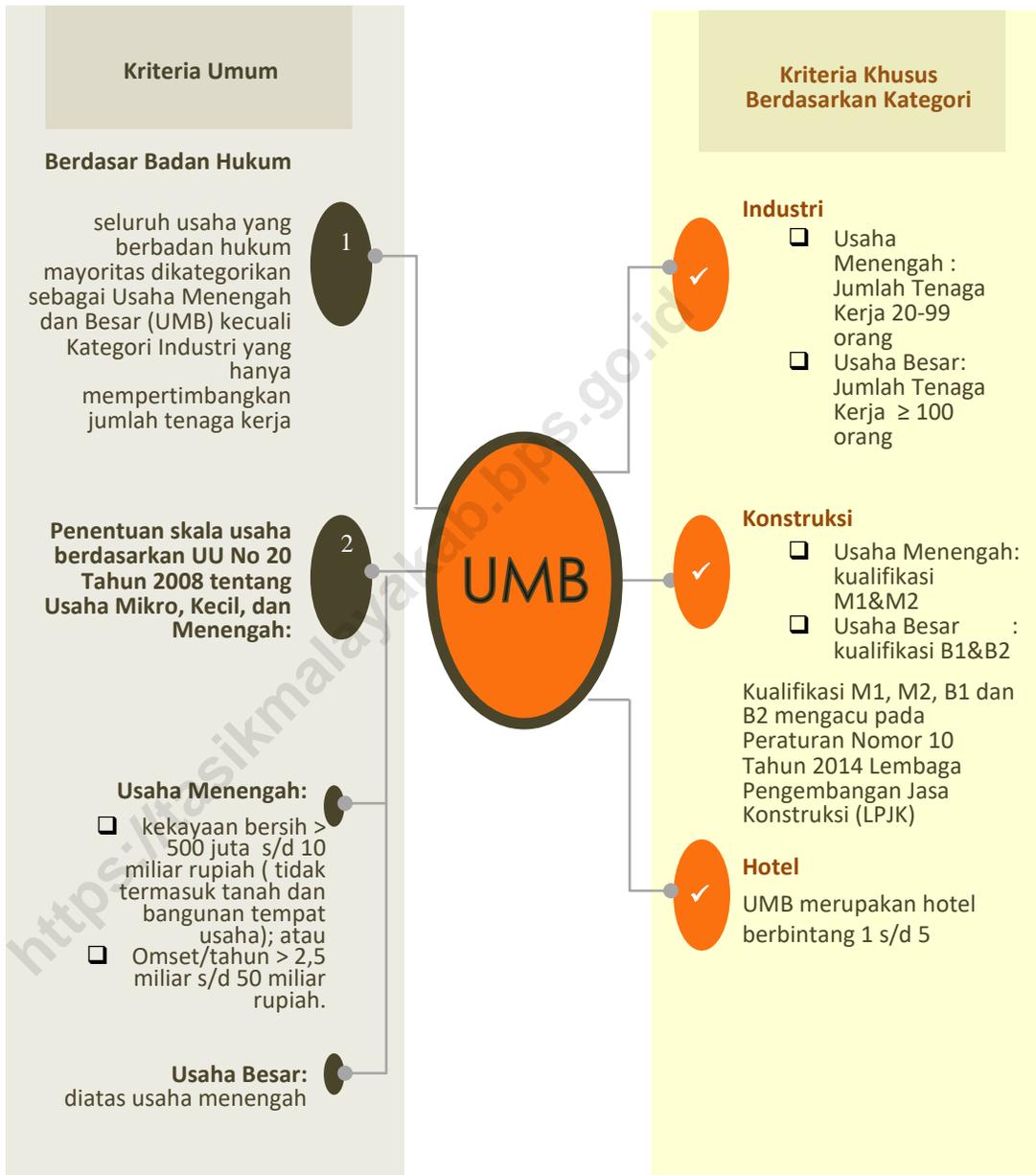
Sumber : Hasil SE2016 Listing. BPS Provinsi Jawa Barat

Lampiran 7
(Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Kategori						Jumlah
	K	L	M.N	P	Q	R.S.U	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
[01] Bogor	9.934	20.929	18.233	86.024	18.380	29.711	1.030.708
[02] Sukabumi	5.852	3.967	6.715	58.328	7.860	12.432	587.110
[03] Cianjur	5.717	3.450	4.941	39.836	5.597	11.850	473.460
[04] Bandung	10.072	8.764	14.175	68.552	8.313	31.517	909.328
[05] Garut	10.076	2.813	5.426	62.490	7.898	12.719	511.673
[06] Tasikmalaya	4.462	1.153	3.612	54.478	4.728	7.603	349.103
[07] Ciamis	4.873	773	3.926	32.299	3.917	7.649	266.313
[08] Kuningan	4.352	659	4.038	23.797	4.771	6.333	190.952
[09] Cirebon	6.857	1.632	6.444	39.742	6.640	25.091	495.087
[10] Majalengka	5.302	1.251	4.108	26.162	3.941	10.291	305.783
[11] Sumedang	6.298	1.181	4.059	28.078	3.023	9.244	294.627
[12] Indramayu	7.346	1.151	5.772	32.481	5.959	21.533	362.252
[13] Subang	7.439	1.911	4.292	30.239	6.721	14.746	354.946
[14] Purwakarta	3.974	2.318	3.952	16.953	5.212	6.685	267.166
[15] Karawang	9.875	5.691	8.794	32.299	9.680	18.511	592.031
[16] Bekasi	7.166	11.420	18.146	43.465	11.649	22.578	945.517
[17] Bandung Barat	4.708	3.839	5.035	32.293	4.124	9.489	346.479
[18] Pangandaran	1.127	497	2.107	8.614	1.252	3.014	120.246
[71] Kota Bogor	10.576	6.869	9.967	24.059	8.579	9.431	248.923
[72] Kota Sukabumi	8.937	2.235	1.529	9.829	2.001	3.898	97.237
[73] Kota Bandung	40.229	12.058	47.237	67.174	24.188	47.028	.019.614
[74] Kota Cirebon	7.752	1.614	3.570	12.377	3.341	5.512	120.539
[75] Kota Bekasi	15.612	17.975	17.744	40.069	17.835	28.409	598.929
[76] Kota Depok	13.864	18.837	11.880	45.140	11.187	19.162	409.619
[77] Kota Cimahi	7.056	3.847	3.592	11.515	3.731	5.279	191.958
[78] Kota Tasikmalaya	6.490	3.147	3.719	20.766	4.819	6.749	220.135
[79] Kota Banjar	1.680	407	2.137	6.026	1.691	1.903	60.998
[32] Jawa Barat	27.626	140.388	25.150	953.085	97.037	388.367	1.370.733

Sumber : Hasil SE2016 Listing. BPS Provinsi Jawa Barat

Lampiran 8
Kriteria Skala Usaha Menengah Besar (UMB)



Lampiran 9

Penjelasan Kategori Lapangan Usaha

- ✓ Pembagian kategori lapangan usaha berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- ✓ Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan salah satu klasifikasi baku yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk aktivitas ekonomi. KBLI 2015 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2009 Cetakan III. sehingga KBLI 2015 masih tetap mengacu kepada *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 4* yang diterbitkan oleh *United Nations of Statistical Division (UNSD)* Tahun 2008
- ✓ **Kategori A : Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan**

Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha. yang meliputi pertanian tanaman pangan. perkebunan. hortikultura. peternakan. pemanenan hasil hutan serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut. *Dalam SE2016 kategori lapangan usaha ini tidak dicakup*
- ✓ **Kategori B : Pertambangan dan Penggalan**

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami. yaitu padat (batu bara dan bijih logam). cair (minyak bumi) atau gas (gas alam). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti penambangan dan penggalan di permukaan tanah atau dibawah tanah. pengoperasian sumur pertambangan. penambangan di dasar laut dan lain-lain. Kategori ini juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan seperti pemecahan. pengasahan. pembersihan. pengeringan. sortasi. pemurnian bijih logam. pencairan gas alam dan aglomerasi bahan bakar padat
- ✓ **Kategori C : Industri Pengolahan**

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan. unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian. kehutanan. perikanan. pertambangan atau penggalan seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan. pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik. mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan di sini adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan. kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.
- ✓ **Kategori D : Pengadaan Listrik. Gas. Uap/Air Panas Dan Udara Dingin**

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik. gas alam. uap panas. air panas dan sejenisnya melalui jaringan. saluran

atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti. termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau bangunan tempat tinggal. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan udara dingin/sistem tata udara. Termasuk kegiatan produksi es baik untuk kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan lainnya. Kategori ini tidak mencakup pengoperasian sarana air bersih dan pembuangan limbah/kotoran. Juga tidak mencakup (khususnya jarak jauh) angkutan gas melalui saluran pipa.

✓ **Kategori E : Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi**

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan air. Kategori ini juga mencakup pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan yang berasal dari rumah tangga dan industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah/sampah dapat dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya.

✓ **Kategori F : Konstruksi**

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara

✓ **Kategori G : Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor**

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

✓ **Kategori H : Pengangkutan dan Pergudangan**

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang terjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/ bongkar muat barang.

- pergudangan dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkut dengan pengemudi atau operator. juga kegiatan pos dan kurir.
- ✓ **Kategori I : Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum**
Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.
 - ✓ **Kategori J : Informasi dan Komunikasi**
Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, penyediaan sarana untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk tersebut, dan juga data atau kegiatan komunikasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya.
 - ✓ **Kategori K : Aktivitas Keuangan dan Asuransi**
Kategori ini mencakup aktivitas keuangan, termasuk asuransi, reasuransi dan kegiatan dana pensiun dan jasa penunjang keuangan.
Kategori ini juga mencakup kegiatan dari pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis .
 - ✓ **Kategori L : Real Estat**
Kategori ini mencakup kegiatan orang yang menyewakan, agen dan atau broker/perantara dalam penjualan atau pembelian real estat, penyewaan real estat dan penyediaan jasa real estat lainnya, seperti jasa penaksir real estat atau bertindak sebagai agen pemegang wasiat real estat. Kegiatan dalam kategori ini bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang disewa dan bisa dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Termasuk kegiatan pembangunan gedung, yang disatukan dengan pemeliharaan atau penyewaan bangunan tersebut. Kategori ini mencakup pengelola bangunan real estat. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.
 - ✓ **Kategori M : Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis**
Kategori ini mencakup khususnya kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik, kegiatan ini membutuhkan suatu tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmupengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna.
 - ✓ **Kategori N : Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan jasa Perusahaan Lainnya**
Kategori ini mencakup berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum. Kegiatan ini berbeda dari kegiatan yang termasuk dalam kategori M, karena tujuan utamanya bukanlah transfer ilmu pengetahuan khusus
 - ✓ **Kategori O : Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**
Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup

perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundangan-undangan. kegiatan legislatif. perpajakan. pertahanan negara. keamanan dan keselamatan negara. pelayanan imigrasi. hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah. Kategori ini juga mencakup kegiatan jaminan sosial wajib. Status hukum atau institusi bukanlah. (termasuk didalamnya) faktor penentu bagi suatu kegiatan termasuk kategori ini dari pada kegiatan yang sudah disebutkan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan bahwa kegiatan yang diklasifikasikan di tempat lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini. meskipun juga dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh. administrasi sistem sekolah (peraturan. pemeriksaan. dan kurikulum) termasuk pada kategori ini. tetapi pengajaran itu sendiri tidak (kategori P). dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori kesehatan (Q). Demikian pula. beberapa kegiatan yang disebutkan pada kategori ini mungkin saja dilakukan oleh selain badan pemerintah. ***Dalam SE2016 kategori lapangan usaha ini tidak dicakup***

✓ **Kategori P : Pendidikan**

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan. baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda-beda seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa. program literasi dan lain-lain. Juga mencakup akademi dan sekolah militer. sekolah penjara dan lain-lain sesuai dengan tingkatan masing-masing. Untuk setiap tingkat pendidikan pertama. kelompok ini mencakup pendidikan khusus termasuk siswa cacat baik mental atau fisik.

Kategori ini mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga dan hiburan dan kegiatan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan. melalui penyiaran radio dan televisi. internet dan surat menyurat .

✓ **Kategori Q : Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial**

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan aktivitas sosial. Kegiatan yang termasuk cukup luas cakupannya. dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain. sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.

✓ **Kategori R : Kesenian. Hiburan dan Rekreasi**

Kategori ini mencakup kegiatan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan. hiburan dan rekreasi masyarakat umum. termasuk pertunjukan langsung. pengoperasian tempat bersejarah. tempat perjudian. olahraga dan rekreasi.

✓ **Kategori S : Aktivitas Jasa Lainnya**

Kategori ini (sebagai kategori sisaan) mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi. reparasi komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang

pribadi. berbagai kegiatan jasa perorangan yang tidak dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini.

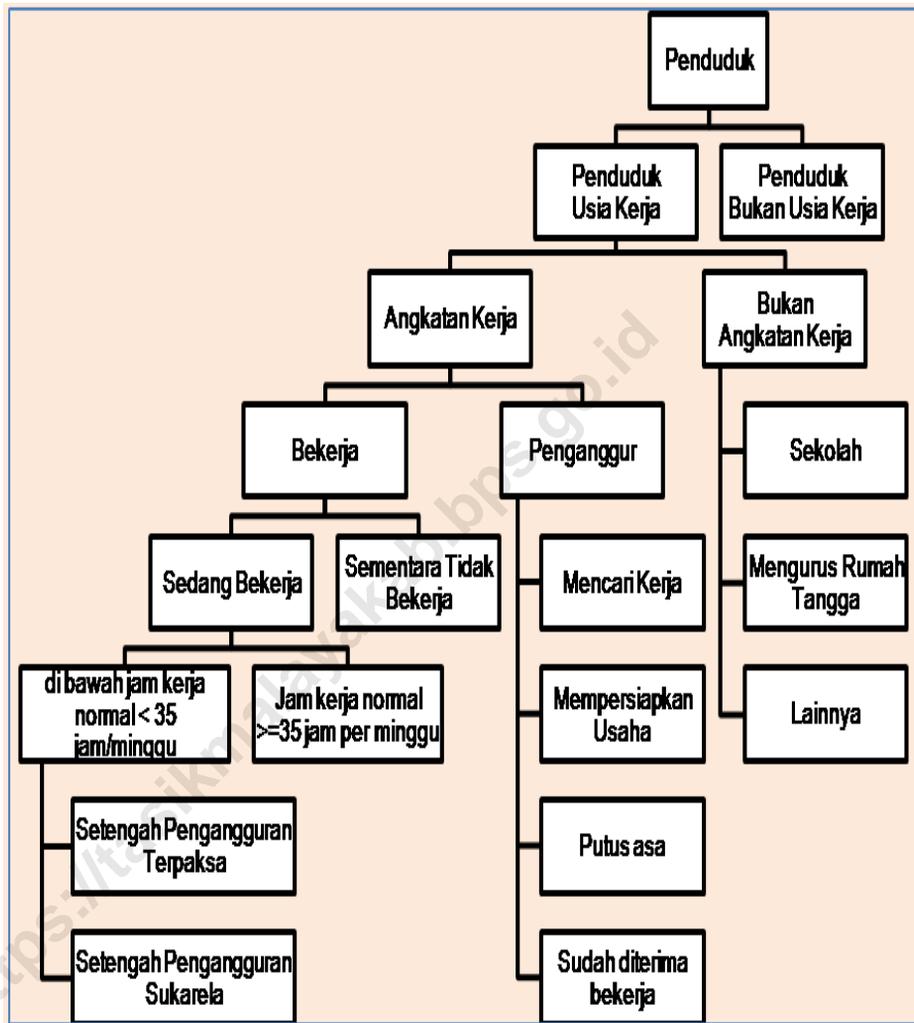
✓ **Kategori T : Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja. Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri**

Kategori ini mencakup kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja dan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. *Dalam SE2016 kategori lapangan usaha ini tidak dicakup*

✓ **Kategori U : Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya**

Kategori ini mencakup kegiatan Badan Internasional. seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan Regional dan lain-lain. termasuk The International Monetary Fund. The World Bank. The World Customs Organization (WCO). the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). the European Communities. the European Free Trade Association dan lain-lain. Kategori ini mencakup kegiatan perwakilan diplomatik dan konsulat (Kedutaan Besar) yang ditentukan oleh negara dimana berada daripada negara yang diwakilinya.

Lampiran 10
Bagan Ketenagakerjaan



Sumber : Badan Pusat Statistik

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tasikmalaya**

Jl. Raya Timur Singaparna Km 4 Cintaraja, Tasikmalaya
Telp. (0265) 549281 Faks. (0265) 549253
Email: bps3206@bps.go.id
[Http://tasikmalayakab.bps.go.id](http://tasikmalayakab.bps.go.id)

